



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 (3 - 22 Juni 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

F 1/7/24

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI II	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	25
KOMISI III	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	31
C. FUNGSI PENGAWASAN	39
D. TUGAS KHUSUS	42
KOMISI IV	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI ANGGARAN	43

C. FUNGSI PENGAWASAN	44
KOMISI V	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	49
C. FUNGSI PENGAWASAN	50
D. TUGAS KHUSUS	51
KOMISI VII	52
A. FUNGSI LEGISLASI	52
B. FUNGSI ANGGARAN	52
C. FUNGSI PENGAWASAN	53
KOMISI VIII	57
A. FUNGSI LEGISLASI	57
B. FUNGSI ANGGARAN	57
C. FUNGSI PENGAWASAN	58
KOMISI IX	59
A. FUNGSI LEGISLASI	59
B. FUNGSI ANGGARAN	59
C. FUNGSI PENGAWASAN	60

KOMISI X	63
A. FUNGSI LEGISLASI	63
B. FUNGSI ANGGARAN	63
C. FUNGSI PENGAWASAN	66
KOMISI XI	70
A. FUNGSI LEGISLASI	70
B. FUNGSI ANGGARAN	70
C. FUNGSI PENGAWASAN	105
D. TUGAS KHUSUS	105
BADAN LEGISLASI	110
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	113
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	131
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	134

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federatif Brasil Tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan</p> <p>2) RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan</p> <p>3) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan</p> <p>4) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kerja sama Di Bidang Pertahanan</p> <p>5) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kerja sama Di Bidang Pertahanan</p>	<p>Raker Komisi I DPR RI Dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, dan Kemkumham) tanggal 19 Juni 2024.</p>	<p>Pembicaraan Tk.I/Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Penjelasan Pemerintah;3. Pandangan Fraksi;4. Pembahasan DIM (Pembentukan Panja);5. Penutup.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemkominfo RI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI dan dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat, Komisioner KI Pusat serta Anggota Dewan Pers tanggal 10 Juni 2024.	1. Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 Mitra Kerja Komisi I DPR RI; dan 2. Pembahasan RKA dan RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun 2025.	
2.	Kemlu RI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu RI tanggal 10 Juni 2024.		
3.	LPP RRI & LPP TVRI	RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI tanggal 11 Juni 2024.		
4.	Kemhan RI & Panglima TNI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU tanggal 12 Juni 2024.		
5.	Kepala BSSN dan Kepala Bakamla	Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN dan Kepala Bakamla tanggal 12 Juni 2024.		
6.	Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas	RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas tanggal 13 Juni 2024.		
7.	Kepala BIN	Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN tanggal 13 Juni 2024.		

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KEMLU RI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI tanggal 5 Juni 2024.	<p>Dalam rangka mengetahui:</p> <p>Sesi I : Anggaran infrastruktur Diplomasi meliputi : 1. Tunjangan dan Dasar Fasilitas Pegawai di Perwakilan : 1) Angka Dasar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri 2) Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTPLN) sesuai jenjang gelar diplomatik dan golongan PNS 3) Tunjangan penghidupan suami isteri. 4) Tunjangan anak. 5) Fasilitas sewa rumah. 6) Restitusi pengobatan 2. Sarana dan prasarana (Sebagai tindak lanjut Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Perwakilan RI di Luar Negeri).</p> <p>Sesi II : 1. Perkembangan situasi terkini di Palestina, khususnya <i>military offensive</i> Israel di Rafah.</p> <p>Diplomasi RI dalam menggalang pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB.</p>	
2.	1. KEMHAN RI 2. KEMENKEU RI 3. PANGLIMA TNI	Tanggal 6 Juni 2024.	<p>Membahas Surat Menteri Pertahanan :</p> <p>Sesi I : 1. Nomor: B/2045/M/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, hal: Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankan dari dan/ke Luar Negeri;</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Nomor B/2471/M/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, hal: Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri; dan Sesi II : Penjelasan Mengenai Rencana dan Persiapan Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian TNI ke Gaza, Palestina.	
3.	TNI	Tanggal 7-9 Juni 2024. 1) Pusat Pendidikan Kavaleri 2) Pusat Psikologi TNI 3) PT Sentra Surya Ekajaya	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dalam rangka mengetahui 1) Peran Pusat Pendidikan Kavaleri TNI AD Dalam Pengembangan Konsep Perang Modern TNI AD; 2) Peran Pusat Psikologi TNI Dalam Memberikan Dukungan dan Layanan Psikologi Bagi Prajurit TNI Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok; 3) Peran PT Sentra Surya Ekajaya Dalam Mendukung Kebutuhan Alutsista TNI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Deputi Bid. Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, pada hari Kamis, 20 Juni 2024.	1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota, adapun Kab/Kota tersebut, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau b. Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung c. Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung d. Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung e. Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi f. Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi g. Kabupaten Merangin Provinsi Jambi h. Kota Jambi Provinsi Jambi i. Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau j. Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau k. Kabupaten Kampar Provinsi Riau l. Kota Pekanbaru Provinsi Riau m. Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat n. Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat o. Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat p. Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 	Pembahasan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>q. Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>r. Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat</p> <p>s. Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat</p> <p>t. Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat</p> <p>u. Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat</p> <p>v. Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat</p> <p>w. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat</p> <p>x. Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat</p> <p>y. Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat</p> <p>z. Kota Solok Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Pemerintah dan DPD RI menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota tersebut.</p>	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • KPU RI • Bawaslu RI 	<p>Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebagai berikut:</p> <p>a. KPU RI</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Bawaslu RI, dengan agenda pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Senin, 10 Juni 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp19.624.808.435.401,00 (<i>sembilan belas triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus satu rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp20.256.596.163.000,00 (<i>dua puluh triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>) atau sebesar 96.88%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 28 Mei 2024) sebesar Rp20.952.075.872.941,00 (<i>dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp28.398.893.459.000,00 (<i>dua puluh delapan triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau sebesar 73.78%; • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp3.062.311.327.000,00 (<i>tiga triliun enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i>); <p>b. Bawaslu RI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp8.586.440.489.567,00 (<i>delapan triliun lima ratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp9.943.019.129.000,00 (<i>sembilan triliun sembilan ratus</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>empat puluh tiga miliar sembilan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 86.36%;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2024 (per 31 Mei 2024) sebesar Rp5.832.103.838.416,00 (<i>lima triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar seratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp11.611.620.116.000,00 (<i>sebelas triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh juta seratus enam belas ribu rupiah</i>) atau sebesar 50.23%; • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp2.416.945.124.000,00 (<i>dua triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah</i>); <p>2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.</p>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri/BNPP • DKPP 	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai berikut:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> Otorita Ibu Kota Nusantara 	<p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Senin, 10 Juni 2024.</p>	<p>a. Kemendagri</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,- (<i>empat triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp4.385.969.126.000,- (<i>empat triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 97.25%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran DKPP sebesar Rp84.563.725.816,- (<i>delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima delapan ratus enam belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran DKPP tahun 2023 sebesar Rp91.686.384.000,- (<i>sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah</i>) atau sebesar 92.23%; Realisasi APBN tahun 2024 (per 31 Mei 2024) sebesar Rp1.339.940.821.014,- (<i>satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp3.960.309.192.000,- (<i>tiga triliun sembilan ratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah</i>) atau sebesar 33.83%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran DKPP sebesar Rp27.290.070.314,- (<i>dua puluh tujuh</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah) dari pagu alokasi anggaran DKPP tahun 2024 sebesar Rp67.532.578.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 40.41%;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,- (empat triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), sudah termasuk pagu indikatif DKPP tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,- (delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).</i> <p>b. BNPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp246.205.261.906,- (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus lima juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp247.666.124.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99.41%;</i> • <i>Realisasi APBN tahun 2024 (per 31 Mei 2024) sebesar Rp91.557.760.648,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sebesar Rp232.574.309.000,- (<i>dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah</i>) atau sebesar 39.37%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,- (<i>dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>); <p>c. OIKN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp271.719.143.190,- (<i>dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp285.909.376.000,- (<i>dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 95.04%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 8 Juni 2024) sebesar Rp177.634.274.589,- (<i>seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp543.366.166.000,- (<i>lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 32.69%; 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,- (<i>lima ratus lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>); <p>2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh DKPP dan OIKN sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan tambahan anggaran tahun 2024 DKPP sebesar Rp22.482.304.269,- (<i>dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah</i>). • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 OIKN sebesar Rp29.864.642.157.000,- (<i>dua puluh sembilan triliun delapan ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>). <p>3. Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sekretariat Negara • Sekretariat Kabinet, • Kantor Staf Presiden • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 	<p>Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Selasa, 11 Juni 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai berikut:</p> <p>a. Setneg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp4.490.447.063.630,- (<i>empat triliun empat ratus sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp4.614.692.296.000,- (<i>empat triliun enam ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 97.31%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran KSP sebesar Rp118.995.278.243,- (<i>seratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran KSP tahun 2023 sebesar Rp120.704.012.000,00 (<i>seratus dua puluh miliar tujuh ratus empat juta dua belas ribu rupiah</i>) atau sebesar 98.58%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 3 Juni 2024) sebesar Rp963.302.523.718,- (<i>Sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.025.453.990.000 (<i>tiga triliun dua puluh lima miliar</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</i> atau sebesar 31.84%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran KSP sebesar Rp41.950.233.610,- (<i>empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran KSP tahun 2024 sebesar Rp117.266.368.000,- (<i>seratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>) atau sebesar 35.77%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp2.472.916.534.000, (<i>dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah</i>), sudah termasuk pagu indikatif KSP tahun 2025 sebesar Rp118.376.119.000,- (<i>seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah</i>); • Usulan pergeseran anggaran antar program pada pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp363.373.989.000,- (<i>tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah</i>). <p>b. Setkab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp350.831.451.401 (<i>tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus satu rupiah</i>) dari pagu 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp356.605.412.000 (<i>tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah</i>) atau sebesar 98.38%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2024 (per 31 Mei 2024) sebesar Rp189.365.944.216,- (<i>seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp424.390.095.000 (<i>empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 44.62%; • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp428.946.313.000,- (<i>empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah</i>); • Usulan pergeseran anggaran antar program pada pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp11.467.083.000,- (<i>sebelas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah</i>); • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp164.310.895.000,- (<i>seratus enam puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>). 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. BPIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp335.364.672.060,- (<i>tiga ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp347.841.015.000,- (<i>tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima belas ribu rupiah</i>) atau sebesar 96.41%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 3 Juni 2024) sebesar Rp180.214.285.137,- (<i>seratus delapan puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp313.669.820.000,- (<i>tiga ratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah</i>) atau sebesar 57.45%; • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp299.428.347.000,- (<i>dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah</i>); • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp100.000.000.000,- (<i>seratus miliar rupiah</i>). <p>Komisi II DPR RI meminta kepada Setneg, Setkab, KSP, dan BPIP untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.	
4.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ATR/BPN RI 	<p>Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Selasa, 11 Juni 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp7.874.964.280.962,- (<i>tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp8.072.163.385.000,- (<i>delapan triliun tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 97,56%.</p> <p>b. Realisasi APBN tahun 2024 (per Mei 2024) sebesar Rp2.379.881.308.201,- (<i>dua triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.607.171.296.000,- (<i>tujuh triliun enam ratus tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>) atau sebesar 31,28%.</p> <p>2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2025 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp6.454.781.052.000,- (<i>enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah</i>)</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 selanjutnya.</p> <p>3. Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.586.538.037.000,- (<i>tujuh triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>), Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.</p>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • LAN • ANRI • Ombudsman RI 	<p>Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. Kepala LAN, Sekretaris Utama ANRI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda pembicaraan</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai berikut:</p> <p>a. LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp326.795.085.559,- (<i>tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Rabu, 12 Juni 2024.</p>	<p>sebesar Rp329.099.461.000,- (<i>tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>) atau sebesar 99.30%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2024 (per 11 Juni 2024) sebesar Rp122.729.004.584,- (<i>seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp312.277.135.000,- (<i>tiga ratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 39.30%. • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp315.388.668.000,- (<i>tiga ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>). <p>b. ANRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp264.771.351.000,- (<i>dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp267.670.167.000,- (<i>dua ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah</i>) atau sebesar 98.92%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 10 Juni 2024) sebesar Rp135.276.070.253,- (<i>seratus tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp282.425.872.000,- (<i>dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>) atau sebesar 47.90%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp251.995.636.000,- (<i>dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah</i>). <p>c. ORI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp227.552.664.570,- (<i>dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp239.573.667.000,- (<i>dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah</i>) atau sebesar 94.98%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 10 Juni 2024) sebesar Rp96.332.957.564 (<i>sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp206.183.560.000 (<i>dua ratus enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah</i>) atau sebesar 46.72%; 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp232.211.019.000 (dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah). <p>2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh LAN, ANRI, dan ORI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 LAN sebesar Rp121.887.230.253,- (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah); • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 ANRI sebesar Rp239.366.284.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah); • Usulan tambahan anggaran tahun 2024 ORI sebesar Rp12.300.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus juta rupiah); • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 ORI sebesar Rp201.728.215.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah); <p>Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada LAN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.</p>	
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PANRB RI • Badan Kepegawaian Negara • KASN 	<p>Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB RI yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua KASN, dengan agenda pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024, pada hari Rabu, 12 Juni 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian PANRB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp315.957.346.358,- (<i>tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp320.334.025.000,- (<i>tiga ratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 98.62%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 10 Juni 2024) sebesar Rp149.840.466.429,- (<i>seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp378.049.699.000,- (<i>tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i>) atau sebesar 39.64%; 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp359.980.127.000,- <i>(tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).</i> b. BKN <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp1.029.852.541.554,- <i>(satu triliun dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)</i> dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.079.227.170.000,- <i>(satu triliun tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)</i> atau sebesar 95.43%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 31 Mei 2024) sebesar Rp344.411.610.154,- <i>(tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu seratus lima puluh empat rupiah)</i> dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp783.765.194.000,- <i>(tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)</i> atau sebesar 43.94%; • Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp798.342.991.000,- <i>(tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. KASN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi APBN tahun 2023 Rp52.607.509.465,- (<i>lima puluh dua miliar enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp53.802.468.000,- (<i>lima puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>) atau sebesar 97.78%; • Realisasi APBN tahun 2024 (per 10 Juni 2024) sebesar Rp25.534.999.876,- (<i>dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp44.796.293.000,- (<i>empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah</i>) atau sebesar 57.00%. <p>2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian PANRB dan BKN sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian PANRB sebesar Rp290.000.162.000,- (<i>dua ratus sembilan puluh miliar seratus enam puluh dua ribu rupiah</i>); • Usulan tambahan anggaran tahun 2025 BKN sebesar Rp59.465.087.000,- (<i>lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>); 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, dan KASN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah, pada tanggal 4 – 6 Juni 2024.</p>	Terkait Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria.	
2.	Kementerian Dalam Negeri	a. Pelaksanaan undang-undang;	1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap semua	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda evaluasi Pj Kepala Daerah, Rencana Desain Besar Penataan Daerah, dan lain-lain, pada hari Senin, 10 Juni 2024.</p>	<p>Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang saat ini menjabat dengan tolak ukur berbasis pada indikator penilaian capaian Kinerja, Kemajuan daerah, Kapasitas dan Integritas serta dapat menjalankan azas-azas pemerintahan yang baik serta memberikan pertanggungjawaban atas jabatan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah berikutnya yang akan menjabat hingga dilantiknya Gubernur/Bupati/Walikota definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, dilaksanakan secara selektif dalam proses pengusulan, pengisian, penetapan dan penempatan Penjabat Kepala Daerah yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin menyusun desain besar penataan daerah sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Terkait dengan evaluasi 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) daerah Provinsi di Wilayah Papua, Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) daerah Provinsi di wilayah Papua.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kementerian ATR/BPN RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program pertanahan, pada hari Selasa, 11 Juni 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk meminimalisir gerakan mafia tanah.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang kebijakan sertifikat elektronik mengingat tingginya ketergantungan kepada teknologi yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek seperti: anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan keamanan.</p> <p>3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagai upaya meminimalisir permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam bidang pertanahan, kawasan hutan, maupun pertambangan.</p> <p>4. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi acuan penerbitan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</p> <p>5. Terhadap mafia tanah, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan kasus mafia</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tanah dengan respon cepat terhadap laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta melakukan pembenahan secara menyeluruh di Kementerian ATR/BPN</p> <p>6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk memberikan bantuan hukum maksimal kepada para pegawai di Kementerian ATR/BPN ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.</p>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia • Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa BALI • Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN) • Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia • Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia • Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia 	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi II DPR RI dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia, Ketua Paikaten Penyuluh Bahasa BALI, Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Solidaritas Wiyatabakti Nasional Indonesia, Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, Ketua Forum Guru</p>	<p>Para tenaga honorer menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan peraturan turunan UU ASN segera diterbitkan mengingat batas waktu penataan tenaga non ASN hanya 3 bulan lagi hingga Desember 2024. 2. Tenaga honorer yang terdata dalam aplikasi BKN maupun yang tidak terdata dapat diangkat menjadi PPPK. 3. Memberikan alokasi formasi pada pengadaan CASN tahun 2024 untuk jabatan tenaga kependidikan, penyuluh Bahasa Bali, penyuluh KB, guru Bahasa Jepang, dan guru agama Kristen. 4. Menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sudah lulus tes namun belum mendapatkan formasi serta menerbitkan SK. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Sawasta Nusantara • Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali • Ketua Forum Penyuluh Nusantara • Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali 	<p>Prioritas Pertama Negeri Dan Sawasta Nusantara, Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali, Ketua Forum Penyuluh Nusantara, dan Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non Administrasi Pemerintah Bali, dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat terkait permasalahan penataan Non ASN, pada hari Rabu, 19 Juni 2024.</p>	<p>5. Memberikan kesempatan yang sama bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan pengamanan dalam untuk dapat diangkat menjadi PPPK.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penyusunan RUU tentang Penyadapan	---	Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan masukan Anggota Komisi III DPR RI.	RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI.
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme (TPPT)	---	Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 2023.	Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3.	Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	---	Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Narkotika)	---	Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk dipelajari.	
5.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Mahkamah Konstitusi)	Pengambilan Keputusan Tk I RUU tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Mei 2024.	Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopolkumham dan Menkumham dalam hal ini diwakilkan oleh Dirjen PP Kemenkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tk. I pada tanggal 13 Mei 2024, dan memutuskan Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna. Saat ini Komisi III DPR RI masih menunggu penjadwalan Pembahasan Tk II RUU tentang Mahkamah di Rapat Paripurna.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Plt. Sekjen MPR RI 2. Sekjen DPD RI	RDP dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022.	<u>Kesimpulan:</u> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Plt. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp924.541.354.000,- (<i>Sembilan ratus dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp251.626.938.000,- (<i>Dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp1.176.168.292.000,- (<i>Satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.170.574.261.000,- (<i>Satu triliun seratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp434.647.907.000,- (<i>Empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp1.605.222.168.000,- (<i>Satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Atas perjuangan usulan tambahan anggaran pada poin 2 dan 3 tersebut di atas, Komisi III DPR RI akan melakukan evaluasi dan pendalaman terlebih dahulu dengan para mitra kerja pengusul (MPR RI dan DPD RI), di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Kantor DPD RI di setiap provinsi. b. Biaya Pemeliharaan Kantor DPD RI. c. Biaya Kegiatan Pengelolaan Administrasi, Publikasi, dan Layanan Informasi MPR RI. 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BNPT 2. Kepala BNN 	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 15.00 WIB, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 2. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 3. Kebutuhan anggaran BNNP hasil kunker reses. 	<p><u>Kesimpulan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.455.081.387.000,- (<i>Satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp608.679.234.000,- (<i>Enam ratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp2.063.760.621.000,- (<i>Dua triliun enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>). 3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp626.396.579.000,- (<i>Enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp250.611.731.000,- (<i>Dua ratus lima puluh miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp877.008.310.700,- (<i>Delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah</i>). 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala PPAK 2. Ketua KPK 	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 pukul</p>	<p><u>Kesimpulan:</u></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>10.00 WIB, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000,- (<i>Satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp117.126.478.000,- (<i>Seratus tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp1.354.567.804.000,- (<i>Satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah</i>). 3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp254.560.077.000,- (<i>Dua ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp457.791.269.000,- (<i>Empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp712.351.346.000,- (<i>Tujuh ratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah</i>). 4. Terkait usulan tambahan anggaran pada poin 2 dan 3 tersebut di atas, Komisi III DPR RI akan melakukan evaluasi dan pendalaman 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			terlebih dahulu dengan para mitra kerja pengusul (KPK dan PPAK).	
4.	Kapolri, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolri, sesuai surat Kapolri Nomor B/8016/VI/HUM.7./2024 tertanggal 9 Juni 2024, Hal: penunjukan Wakapolri dalam Raker dengan Komisi III DPR RI.	Raker dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.00 WIB, membahas: 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 2. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 3. Kebutuhan anggaran Polda hasil kunker reses.	<u>Kesimpulan:</u> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp104.670.300.810.000,- (<i>Seratus empat triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp60.643.680.827.000,- (<i>Enam puluh triliun enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp165.313.981.637.000,- (<i>Seratus enam puluh lima triliun tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>). 3. Terkait usulan tambahan anggaran pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Komisi III DPR RI akan melakukan evaluasi dan pendalaman terlebih dahulu dengan mitra kerja pengusul.	
5.	1. Ketua LPSK 2. Ketua Komnas HAM	Raker dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022.	<u>Kesimpulan:</u> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Pagu	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp229.919.355.000,- (<i>Dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp211.436.212.000,- (<i>Dua ratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp441.355.567.000,- (<i>Empat ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp130.523.737.000,- (<i>Seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebesar Rp37.146.890.000,- (<i>Tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebesar Rp34.023.959.000,- (<i>Tiga puluh empat miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp201.694.586.000,- (<i>Dua ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)</p>	
6.	Menteri Hukum dan HAM RI	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 14.00 wib, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 2. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 	<p><u>Kesimpulan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Kebutuhan anggaran Kanwil Kemenkumham hasil kunker reses.	Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000,- (<i>Dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah</i>)	
7.	1. Sekretaris MA 2. Sekjen MK 3. Sekjen KY	RDP dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 wib, membahas : 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 2. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 3. Kebutuhan anggaran di lingkungan 4 peradilan hasil kunker reses.	<u>Kesimpulan:</u> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.152.558.495.000,- (<i>Dua belas triliun seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp3.009.738.467.000,- (<i>Tiga triliun sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp15.162.296.962.000,- (<i>Lima belas triliun seratus enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah</i>) 3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp611.477.078.000,- (<i>Enam ratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>) 4. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Yudisial Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp167.336.343.000,- (<i>Seratus</i>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)</i> dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp116.890.331.500,- (<i>Seratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp284.226.674.500,- (<i>Dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah</i>)</p>	
8.	Jaksa Agung	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 14.00 wib, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 2. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 3. Kebutuhan anggaran Kejati hasil kunker reses. 	<p><u>Kesimpulan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.976.145.850.000,- (<i>Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp15.573.378.641.000,- (<i>Lima belas triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>) sehingga menjadi sebesar Rp26.549.524.491.000,- (<i>Dua puluh enam triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>). 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dewan Pengawas KPK	Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Dewan pengawas KPK tanggal 5 Juni 2024, dengan agenda Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK.	Kesimpulan RDP Komisi III DPR RI dengan Dewan Pengawas KPK : 1. Komisi III DPR RI meminta Dewan Pengawas KPK untuk meningkatkan fungsi pengawasan Sumber Daya Manusia/ Insan KPK, terutama melalui pembangunan kesadaran etik, pencegahan, maupun penanganan perkara etik untuk mencapai KPK yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. 2. Komisi III DPR RI meminta Dewan Pengawas KPK untuk dapat meningkatkan sinergitas bersama Pimpinan KPK dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
2.	Menteri Hukum dan HAM RI	Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan agenda : 1. Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan reformasi kultur dan struktur. 2. Evaluasi Kinerja Kemenkumham Semester I 2024.	Kesimpulan Raker Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI : 1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar melakukan pengisian/penempatan jabatan serta sistem promosi, mutasi, dan demosi melalui sistem merit yang bersih, adil, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada profesionalitas dan produktivitas kerja. 2. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi Keimigrasian dalam	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mendukung keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran pengawasan orang asing serta peningkatan kualitas layanan Keimigrasian lainnya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk terus mengoptimalkan fungsi Kekayaan Intelektual, sehingga tercipta layanan yang berkualitas, responsif, mudah, dan terbuka.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera mengintegrasikan seluruh pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika agar Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika dapat diselesaikan pada periode 2019-2024.</p>	
3.	Direktur Utama dan Kuasa Hukum dari PT. Bumigas Energi	<p>Pada tanggal 19 Juni 2024 Komisi III DPR RI melaksanakan RDPU dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum dari PT. Bumigas Energi, membahas mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Mantan Ketua KPK.</p>	<p>Dirut PT. Bumigas Energi menyampaikan beberapa hal:</p> <p>a. PT. Bumigas Energi merasa dirugikan pada sengketa perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Mahkamah Agung atas perjanjian kerja (BOT) dengan PT. Geo Dipa Energi dengan Nomor: KTR.001/GDE/II/2005.</p> <p>b. salah satu pertimbangan oleh majelis di sengketa BANI II adalah surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi Pencegahan KPK (Sdr. Pahala Nainggolan) atas nama Pimpinan KPK,</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>perihal Tanggapan terhadap Permohonan Bantuan Klarifikasi ke HSBC oleh PT. Geo Dipa Energi.</p> <p>c. substansi surat dari KPK terkait dengan hal tersebut tidak benar dan sangat merugikan pihak PT. Bumigas Energi dalam perkara perdata di BANI.</p> <p>d. Dirut PT. Bumigas Energi juga mempertanyakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam menanggapi permohonan bantuan dalam perkara perdata tersebut.</p> <p>Tanggapan Komisi III DPR RI:</p> <p>a. Perlu menghadirkan beberapa pihak terkait, seperti Deputi Pencegahan KPK (Pahala Nainggolan), Ketua KPK Periode 2015-2019 (Agus Raharjo), Dirut PT. Geo Dipa Energi, perbankan yang mendanai (HSBC dan BNI), dan pihak PLN.</p> <p>b. Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti pengaduan ini dalam rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait.</p>	
4.	Kapolda Sumatera Selatan	Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 sd 22 Juni 2024 dalam rangka pengawasan penanganan terhadap sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia & PT. Gorby Putra Utama.	Kunjungan kerja dilaksanakan sebagai tindak lanjut RDPU Komisi III DPR RI dengan Konsultan Hukum dari PT. Sentosa Kurnia Bahagia tanggal 27 Mei 2024 yang lalu.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama:</p> <p>a. <i>Calvin Ronald Verdonk (WN Belanda/Pesepak bola)</i></p> <p>b. <i>Jens Raven (WN Belanda/Pesepak bola)</i></p>	<p>Rapat Kerja tanggal 3 Juni 2024.</p>	<p>Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 yang dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/260/PW.01/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 bahwa Komisi III DPR RI mendapat penugasan untuk melakukan Pembahasan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI kepada 2 (dua) orang atlet sepak bola WN Belanda atas nama <i>Calvin Ronald Verdonk</i> dan <i>Jens Raven</i>.</p> <p>Atas penugasan tersebut, pada tanggal 3 Mei 2024 Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menpora RI dan Menkumham RI (diwakili oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum), serta dihadiri Sekjen PSSI.</p> <p><u>Kesimpulan Rapat Kerja:</u> Komisi III DPR RI menyetujui Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama <i>Calvin Ronald Verdonk</i> dan <i>Jens Raven</i>, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Komisi III DPR RI melaporkan hasil pembahasan permohonan pertimbangan pemberian Kewarganegaraan RI kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Nomor B/51-DW/KOM.III/MP.V/06/2024 tertanggal 3 Mei 2024.</p> <p>Pada tanggal 4 Juni 2024 Rapat Paripurna DPR RI memutuskan bahwa DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian Kewarganegaraan RI kepada <i>Calvin Ronald Verdonk</i> dan <i>Jens Raven</i>, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	---

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan DPD RI pada Kamis, 13 Juni 2024.	Pengambilan Keputusan atas Pasal-Pasal Mengenai Ketentuan Pidana (Pasal 40, Pasal 40A dan Pasal 40B).	-
2		Rapat Kerja pada Kamis, 13 Juni 2024. Dihadiri oleh: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Kelautan dan Perikanan; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Hukum dan HAM 6. Ketua Komite II DPD RI	1. Laporan Panja RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE); 2. Pembacaan Naskah RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE); 3. Pendapat Akhir Mini sebagai Sikap Akhir Fraksi, Pemerintah, dan DPD RI; 4. Penandatanganan Naskah RUU; dan 5. Pengambilan Keputusan Tingkat I Untuk Melanjutkan Pada Pembicaraan Tingkat II.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	1. Kepala Badan Pangan Nasional 2. Direktur Utama Perum Bulog; 3. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia/ <i>Id Food</i> ; dan	Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 10 Juni 2024.	1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024 2. RKA dan RKP Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan 3. Isu-isu Aktual Lainnya.	-

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Direktur Utama Perindo			
2	1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia/ <i>Id Food</i> ; 3. Direktur Utama Perindo; dan 4. Direktur Utama PT. Garam (Persero)	Rapat Kerja pada Selasa, 11 Juni 2024.	1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024; 2. RKA dan RKP KKP Tahun 2025; dan 3. Isu-isu Aktual Lainnya.	-
3	1. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 3. Direktur Utama Perum Perhutani; 4. Direktur Utama Inhutani I; serta 5. Direktur Utama Inhutani V	Rapat Kerja pada Rabu, 12 Juni 2024.	1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024; 2. RKA dan RKP KLHK Tahun 2025; dan 3. Isu-isu Aktual Lainnya.	-
4	Dihadiri oleh: 1. Menteri Pertanian; 2. Kepala Badan Pangan Nasional; 3. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan 4. Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI)/ <i> Holding Pangan/ID FOOD</i> .	Rapat Kerja pada Kamis, 20 Juni 2024.	1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024; 2. Kegiatan RKA dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2025; dan 3. Isu-isu Aktual Lainnya.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dihadiri oleh: 1. Gubernur Sumatera Barat; 2. Bupati Tanah Datar; 3. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 4. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari;	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Barat pada 5 Juni s.d 7 Juni 2024.	Kunjungan ke Lokasi Banjir Bandang di TWA Mega Mendung, Nagari Singgalang, Kec. Sepuluh Kuto, Kab. Tanah Datar dan Diskusi terkait Dampak Kerusakan dan Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Banjir dengan Pengelolaan Hutan di Wilayah Hulu.	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan; 6. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 7. Dirjen Palonologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan 8. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat.			
2.	Dihadiri oleh: 1. Pj. Gubernur; 2. Bupati Bangka Tengah; 3. Dirjen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, KLHK; 4. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Bangka Belitung; 6. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Bangka Belitung; 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Tengah; serta 8. Direktur Utama PT. Timah Tbk.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Bangka Belitung pada 5 Juni s.d 7 Juni 2024.	Kunjungan ke Lokasi Wilayah Konsesi PT Timah, Tbk di Desa Kerakas, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah dan Diskusi Mengenai Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Serta Pengelolaan Lingkungan, dan Penggunaan Kawasan Hutan oleh PT Timah, Tbk.	
3.	Dihadiri oleh: 1. Pj. Bupati Luwu; 2. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK; 3. Direktur PDLUK, Ditjen PKTL, Kementerian LHK	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Juni s.d 7 Juni 2024.	Diskusi di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar (BPKHTL Wilayah VII Makassar), perihal “Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu”	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>4. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian LHK; 5. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu; 6. Kepala Balai Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan; 7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang – Saddang; 8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar;</p> <p>Di hadir juga oleh: 1. Direktur Utama PT Masmindo Dwi Area; 2. Direktur Utama PT Bumi Mineral Sulawesi.</p>			
4.	<p>Dihadiri oleh: 1. Eselon I Kementerian Pertanian 2. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 19 Juni 2024.</p>	<p>Membahas Mengenai Persoalan Pupuk Bersubsidi.</p>	-
5.	<p>Dihadiri oleh: 1. Plt. Dirjen Perikanan Budi Daya, Kementerian KP; 2. Kepala Badan Pangan Nasional; 3. Dirut ID FOOD; 4. Dirut PT Pupuk Indonesia; 5. Dirut Perikanan Indonesia; 6. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang;</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada 21 Juni s.d 23 Juni 2024.</p>	<p>Kunjungan dan Diskusi Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB Karawang) Provinsi Jawa Barat.</p>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; dan 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang.			
6.	Dihadiri oleh: 1. Pj. Gubernur Jawa Barat; 2. Bupati Kabupaten Bandung; 3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Barat; 5. Kepala Dinas Perikanan Kab. Bandung; 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bandung; 7. Masyarakat Ikan Hias Kab. Bandung	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada 21 Juni s.d 23 Juni 2024.	Kunjungan ke lokasi <i>Aquazone</i> Indonesia yang mampu membenihkan dan mengekspor ikan hias yang bernilai ekonomi tinggi dan diskusi Ornamen <i>Fish</i> Di <i>Aquazone</i> Indonesia Yang Mampu Membenihkan Dan Mengekspor Ikan Hias Yang Bernilai Ekonomi Tinggi.	
7.	Dihadiri oleh: 1. Pj. Gubernur Jawa Tengah; 2. Bupati Semarang; 3. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK; 4. Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, KLHK; 5. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; 6. Dirjen Hortikultura, Kementan; 7. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan; 8. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementan;	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah 21 Juni s.d 23 Juni 2024.	Peninjauan ke Bumi Perkemahan Kali Pasang, Pulihan, Batur, Kec. Getasan, Kabupaten Semarang dan Diskusi Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Hortikultura serta Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Produktivitas Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah.	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	9. Direksi Perum Perhutani; 10. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero); 11. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah; 12. Perwakilan Masyarakat Binaan Balai TN Merbabu; dan 13. Perwakilan Gabungan Kelompok Tani.			

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Kunsfik dilaksanakan pada tanggals 20 – 22 Juni 2024.	Kunjungan Kerja ke 3 Lokasi dalam rangka Revisi UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: 1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Raker dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai bulan Mei 2024 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025; 3. Lain lain;	
2.	Kementerian Perhubungan	Raker dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai bulan Mei 2024 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025; 3. Lain lain;	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kementerian PUPR	Raker dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai bulan Mei 2024 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025; 3. Lain lain; 	
4.	BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	RDP dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai bulan Mei 2024 2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025; 3. Lain lain; 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kota Pontianak	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.	Diskusi tentang Program Peningkatan Infrastruktur Daerah Tahun 2024.	
2.	Kementerian Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakorlantas POLRI	Raker/RDP dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.	Membahas mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024.	
3.	Bupati Sambas	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.	Konsultasi Pembangunan Stadion Sepak Bola.	
4.	DPRD Kota Samarinda	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.	Diskusi tentang Pembangunan Insfrastruktur dan Jalan.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Menteri Perhubungan 2. Menteri Luar Negeri 3. Menteri Hukum dan HAM 4. Menteri Perdagangan	Raker dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024.	Membahas Rencana Pengesahan <i>Protocol to Implement the Twelfth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keduabelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri ESDM RI	Raker dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB dengan agenda: 1. Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN TA 2025; 2. Pengantar RKA K/L Tahun 2025.	Hasil Pembahasan: 1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan Menteri ESDM RI dan akan mendalami usulan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut sebelum dilakukan persetujuan. 2. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan Menteri ESDM RI terkait Pagu Indikatif Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 9.385.203.737.000 (<i>sembilan triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI. 3. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan Menteri ESDM RI terkait hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.	
2.	Menteri Perindustrian RI	Raker dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.	Pengantar RKA K/L TA. 2025.	Rapat tertutup.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Eselon I Kementerian Perindustrian RI	RDP Dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2024; 2. Pembahasan RKA K/L da RKP Tahun 2025.	Rapat tertutup.
4.	Menteri Perindustrian RI	Raker Dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 18.00 WIB.	Penetapan RKA K/L dan RKP Tahun 2025.	Rapat tertutup.
5.	Eselon I Kementerian ESDM RI	RDP dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2024; 2. Pembahasan RKA K/L da RKP Tahun 2025.	Rapat tertutup.
6.	Kepala BRIN	RDP dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2024; 2. Pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2025; 3. Penetapan RKA K/L dan RKP Tahun 2025.	Rapat tertutup.
7.	Kepala BAPETEN dan BIG	RDP dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.	1. Progres pelaksanaan kegiatan TA. 2024; 2. Pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2025; 3. Penetapan RKA K/L dan RKP Tahun 2025.	Rapat tertutup.
8.	Eselon I Kementerian ESDM RI	RDP dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2025	Rapat tertutup.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dengan agenda: 1. Progres subsidi listrik tepat sasaran Tahun 2024 2. Proyeksi dan strategi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Hasil pembahasan: 1. Komisi VII DPR RI Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi, mengoptimalkan pengawasan, dan pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun dilaporkan hasilnya.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>subsidi listrik tepat sasaran Tahun 2025</p> <p>3. Lain-lain</p>	<p>RDP dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melakukan sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran, antara lain: identifikasi penerima subsidi pada meteran listrik. 3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk melakukan optimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2024. 4. Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI terkait besaran subsidi Listrik dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 83,02-88,36 Triliun rupiah yang akan dirinci lebih lanjut pada pembahasan pagu indikatif RAPBN 2025. 5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2024. 	
2.	<p>Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia dengan agenda:</p> <p>Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. <p>Rapat Audiensi dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.</p>	<p>Hasil pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII DPR RI menerima aspirasi Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan harga gas bumi berdampak pada penurunan pendapatan dan mengurangi berkembangnya badan usaha niaga hilir gas bumi. b. Ketentuan mengenai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan berakhir pada 31 Desember 2024, diharapkan tidak dilanjutkan namun apabila Pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan HGBT, maka Ikatan Perusahaan Gas 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bumi Indonesia mengharapkan agar Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk meninjau kembali biaya yang menjadi komponen HGBT.</p> <p>2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia melalui Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan mitra terkait.</p>	
3.	<p>Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina (Persero) dan Dirut PHE</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.</p> <p>RDP dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.</p>	<p>Hasil Pembahasan:</p> <p>1. Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman secara menyeluruh atas kinerja SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Hulu Energi terkait peningkatan biaya pengadaan barang dan jasa melalui <i>cost recovery</i> dan penurunan <i>lifting</i> migas setiap tahunnya melalui Panja Migas.</p> <p>2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina (Persero) dan Dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 13 Juni 2024.</p>	
4.	<p>Kepala SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, dan Direktur Utama PT Pertamina Eksplorasi Produksi</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.</p> <p>RDP panja Migas dilaksanakan pada</p>	<p>Agenda:</p> <p>Pembahasan Terkait Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Performa <i>Lifting</i> Migas 2021-2024.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		tanggal 12 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB.		
5.	Kunjungan kerja Spesifik Komisi VII DPR RI	Kunsfik dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Juni 2024.	Kunjungan kerja Komisi VII ke: 1. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur; 2. PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur; 3. RDMP Balikpapan, PT Kilang Pertamina Internasional, Kalimantan Timur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI tentang “Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual” pada hari Selasa 4 Juni 2024.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.021.939.759.000,- (<i>tujuh puluh delapan triliun dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah</i>).	
2.	Kementerian Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial RI tentang “Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual” pada hari Selasa 4 Juni 2024.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77.188.005.512.000,- (<i>tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah</i>)	
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang “Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 serta Isu-isu	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.300.654.181.000,- (<i>tiga ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>).	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Aktual” pada hari Selasa 4 Juni 2024.		
4.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB tentang “Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual” pada hari Selasa 4 Juni 2024.	Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp927.574.663.000,- (<i>sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>).	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M.	Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan kunjungan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M ke Arab Saudi dari awal sampai akhir Juni 2024.	Ada banyak temuan Timwas Haji DPR RI terkait dengan pemondokan, catering, transportasi, dan pelayanan bagi para jamaah haji lainnya, termasuk pembagian kuota haji yang menyalahi kesepakatan rapat dengan Komisi VIII DPR RI.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik	Melakukan kunjungan pengawasan ke Medan, Solo, Bekasi dan Kota Bogor pada 11-13 Juni 2024 dan 19-21 Juni 2024.	Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	RDP dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.	Pembahasan RKA-KL & RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
2.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	RDP dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.	Pembahasan RKA-KL & RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
3.	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Rapat Kerja dilaksanakan pada Selasa, 11 Juni 2024.	Pembahasan RKA-KL & RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
4.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	RDP dilaksanakan pada Rabu, 12 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
5.	Pejabat Eselon I Badan POM RI	RDP dilaksanakan pada Rabu, 12 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
6.	Pejabat Eselon I BKKBN RI	RDP dilaksanakan pada Rabu, 12 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
7.	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada Kamis, 13 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
8.	Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan RI	RDP dilaksanakan pada Kamis, 13 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
9.	Pejabat Eselon I BP2MI	RDP dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.
10.	Pejabat Eselon I Kemenaker RI	RDP dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2024.	Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025.	Tertutup.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik Komsis IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik Komsis IX DPR RI Senin s.d. Rabu, 3 s.d. 5 Juni 2024 ke: 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Sulawesi Selatan 3. Provinsi Jawa Tengah	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Asrama Haji pada Musim Haji Tahun 1445 H.	
2.	Menteri Kesehatan RI dan DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan	Rapat Kerja dan RDP pada Kamis, 6 Juni 2024 dengan agenda: 1. Membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 2. Membahas perkembangan penataan Koordinasi Benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatif demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan program JKN.	1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan terhadap Program JKN untuk memastikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memenuhi amanat konstitusi dan prinsip sistem jaminan sosial nasional. 2. Dalam rangka evaluasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk mengkaji secara komprehensif terkait kesiapan rumah sakit, implikasi KRIS terhadap manfaat layanan, tarif, iuran program JKN, kemampuan dan kemauan bayar peserta JKN serta dampaknya terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Hasil kajian disampaikan secara berkala kepada Komisi IX DPR RI setiap dua bulan. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dengan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Sosial RI dalam mencari solusi bagi peserta JKN di kelas III yang tidak aktif dan terbukti tidak mampu, termasuk adanya pemutihan tunggakan dan memasukkan mereka ke dalam kategori Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), demi memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan adil.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan sistem pelayanan Kesehatan secara menyeluruh, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan kecukupan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sehingga ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN; dan 2. mengintensifkan pengawasan dan pembinaan serta penindakan tegas kepada rumah sakit untuk meminimalisir adanya <i>fraud</i> dengan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kontinu mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sebagai dasar untuk 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kredensialing fasilitas kesehatan dan penyedia layanan;</p> <p>2. Mengintensifkan layanan kepesertaan, termasuk adanya mekanisme pengingat iuran, untuk menjaga keaktifan peserta dan meningkatkan jumlah peserta JKN demi meningkatkan cakupan dan keberlanjutan program JKN; dan</p> <p>3. Segera mengeluarkan surat edaran tentang klaim obat kronis paliperidon palmitate untuk skizofrenia ke seluruh cabang BPJS Kesehatan sebagai dasar bagi rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 13 Juni 2024.</p>	
3.	Rapat Internal Komisi IX DPR RI	Rapat Internal pada Senin, 10 Juni 2024.	Penugasan Komisi IX DPR RI berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Juni 2024, untuk Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Tertutup.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan	<p>Tanggal 21--23 Juni 2024 Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Kepariwisataan.</p> <p>Penyerapan aspirasi publik untuk RUU tentang Kepariwisataan ke Provinsi Sumatera Barat, Kota Batam dan Poltekpar Makassar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil dari Kunker Panja RUU tentang Kepariwisataan ke Provinsi Sumatera Barat ditemukan permasalahan pariwisata yaitu terkait harga tiket penerbangan domestik yang sangat tinggi. Usulan terhadap penetapan batas minimal anggaran kepariwisataan juga muncul agar menjadi acuan pemerintah daerah. ▪ Hasil dari Kunker Panja RUU tentang Kepariwisataan ke Kota Batam menjelaskan bahwa kota ini sedang berbenah diri menjadi kota wisata dan perlu adanya pendekatan wisata yang tidak semata-mata pendekatan keamanan pada daerah perbatasan. ▪ Hasil dari Kunker Panja RUU tentang Kepariwisataan ke Poltekpar Makassar disampaikan terkait pentingnya pengaturan mengenai pemasaran dan promosi pariwisata. Selain itu juga disampaikan terkait isu kelembagaan yang seharusnya melibatkan banyak pihak, terutama perguruan tinggi. 	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Mendikbudristek RI	<p>Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB Raker Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI Agenda: Membahas RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2025.</p>	<p>Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap usulan tambahan sebesar Rp25.013.159.081.000 (<i>Dua lima triliun tiga belas miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah</i>) dan mengharapkan Kemendikbudristek untuk memberikan penjelasan dan data lebih rinci. terkait RKA dan RKP K/L pada RAPBN TA 2025 khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan TA 2025 beserta evaluasi pada TA sebelumnya, serta setiap eselon I harus menyajikan perubahan</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			atau penghapusan program/kegiatan yang sebelumnya ada di TA 2024 dan program/kegiatan baru di TA 2025.	
2.	Menparekraf/Kepala Baparekraf	Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB Raker Komisi X DPR RI dengan Menparekraf/Kepala Baparekraf Agenda: Membahas RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2025.	Komisi X DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI sebesar Rp3.052.364.852.000 (<i>Tiga triliun lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>) dan mendesak untuk mengajukan kembali dalam rapat internal pemerintah. Selain itu juga mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai alasan turunnya anggaran yang signifikan dari para Eselon I Kemenparekraf dengan melengkapi data anggaran dan memberi penjelasan terkait dampak penurunan anggaran terhadap target program prioritas nasional, serta memberi penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran termasuk langkah strategisnya.	
3.	Menpora RI	Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora RI Agenda: Membahas RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2025.	Secara umum Komisi X DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran Kemenpora RI sebesar Rp2.967.000.000.000 (<i>Dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar rupiah</i>) dan mendesak untuk segera menyampaikan usulan tersebut pada Pertemuan Trilateral, serta sepakat untuk melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dan RKP TA 2025 dengan Eselon I dengan melengkapi data anggaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan RAPBN TA 2025. Komisi X DPR RI mendesak agar mendapatkan solusi terhadap keterbatasan anggaran bidang kepemudaan dengan memaksimalkan kerja sama lintas sektor dengan K/L lainnya, serta perlunya memperhatikan kelengkapan Sarpras Olahraga secara merata di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kepala Perpustakaan RI	Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 17.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan RI Agenda: Membahas RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2025.	Komisi X DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Perpustakaan RI sebesar Rp375.072.026.000 (<i>Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah</i>) yang akan digunakan untuk peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat untuk melakukan pendalaman dengan Eselon I dan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan data lebih rinci dalam bahan paparan RDP beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran satuan biaya setiap program dalam RAPBN TA 2025.	
5.	Eselon I Kemenparekraf, Kemenpora, Kemendikbudristek , dan Perpustakaan RI	Tanggal 6—12 Juni 2024 Konsinyasi/RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf, Kemenpora, Kemendikbudristek, dan Perpustakaan RI.	Rapat tertutup.	
9.	Plt. Kepala Perpustakaan RI	Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Perpustakaan RI	Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif RAPBN TA 2025 Perpustakaan RI sebesar Rp375.072.026.000 (<i>Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah</i>) dan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI. Komisi X DPR RI juga mendorong Perpustakaan untuk memperbaiki data dan angka RKP RKA K/L TA 2025 serta untuk berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI terkait kenaikan anggaran fungsi pendidikan pada Perpustakaan TA 2025.	
10.	Mendikbudristek RI	Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI.	Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000 (<i>Delapan puluh tiga triliun seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah</i>) dan mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp25.013.159.081.000, (<i>Dua puluh lima triliun tiga belas miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah</i>) serta akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI dengan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			catatan perlu dilakukan pendalaman khusus mengenai rincian program anggaran.	
11.	Menparekraf/Kepala Baparekraf RI	Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Menparekraf/Kepala Baparekraf RI.	Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp1.768.347.952.000 (<i>Satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>) dan usulan tambahan pagu indikatif sebesar Rp3.052.364.852.000, (<i>Tiga triliun lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>) serta akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI.	
12.	Menpora RI	Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Menpora RI.	Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kemenpora RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp1.830.383.940.000 (<i>Satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah</i>) dan usulan tambahan sebesar Rp2.967.000.000.000 (<i>Dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar rupiah</i>) serta akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga RI	Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB. Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Agenda: Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia	Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Jens Raven dan Sdr. Calvin Ronald Verdonk, serta mendorong Pemerintah dan PSSI agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI untuk membangun prestasi olahraga, khususnya persepakbolaan nasional.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		atas nama Sdr. Jens Raven dan Sdr. Calvin Ronald Verdonk.		
2.	Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti oleh Masyarakat (Ormas): PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washilyah	<p>Tanggal 4 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB. RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan penyelenggara Dikdasmen dan Dikti oleh Masyarakat (Ormas): PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washilyah.</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh swasta (sumber dan komponen kebutuhan) 2. Penyampaian data dan pelaksanaan program bantuan pendidikan oleh Pemerintah kepada swasta. 3. Usulan regulasi pembiayaan Pendidikan. untuk swasta 	Secara umum, Komisi X DPR RI mendukung pandangan yang disampaikan oleh Ormas yang hadir dan mendorong untuk memberikan kajian komprehensif terkait alokasi anggaran pendidikan dan distribusinya di setiap K/L dengan menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan di setiap Lembaga pendidikan di bawah Kemenag RI dan Kemendikbudristek RI agar mendapatkan gambaran postur anggaran pendidikan. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian secara khusus dengan mengundang pakar, K/L terkait dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menghitung rasionalitas distribusi anggaran fungsi pendidikan.	
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	<p>Tanggal 14—16 Juni 2024. Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) ke Kota Bogor.</p> <p>Tanggal 14—16 Juni 2024. Kunjungan Kerja Spesifik Bidang</p>	<p>Dalam pertemuan disampaikan terkait alokasi anggaran pada dinas pendidikan yang digunakan untuk pengelolaan PAUD, SD SMP dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Permasalahan pendidikan yang mengemuka yaitu kebutuhan unit sekolah SMP untuk menampung lulusan SD dan kekurangan guru SD serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan.</p> <p>Dalam pertemuan disampaikan bahwa Pemkot Tangerang telah memenuhi <i>mandatory spending</i> 20% APBD.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) ke Kota Tangerang.	Permasalahan yang mengemuka adalah belum adanya SLB negeri, dan adanya siswa yang ijazahnya ditahan karena alasan biaya, serta kurangnya dukungan pemerintah provinsi dalam even nasional/internasional.	
		Tanggal 14—16 Juni 2024. Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) ke Kabupaten Bandung.	Dalam pertemuan disampaikan bahwa Pemkab sudah memenuhi <i>mandatory spending</i> 20% anggaran pendidikan dari APBD yaitu sebesar 32%. Permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya daya tampung siswa SMA/K, terhambatnya upaya inventarisasi aset pendidikan, terhambatnya penyaluran bantuan PIP, dan disorientasi lulusan Program Guru Penggerak, serta penempatan ASN-PPPK yang dinilai merugikan sekolah swasta.	
4.	Eselon I Kemendikbudristek RI, dan Eselon I Kemendagri RI	Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB. RDP Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemendikbudristek RI, dan Eselon I Kemendagri RI.	Secara umum, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek dan Kemendagri untuk menyosialisasikan pada pemangku pendidikan daerah terkait pemenuhan anggaran pendidikan 20% APBD serta membuat sistem pengendalian internal untuk fokus pada penggunaan anggaran tersebut. Selain itu juga mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait anggaran fungsi pendidikan yang dikelola K/L lain.	
5.	Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat, dan Forum Guru Priotitas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah	Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB. RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat, dan Forum Guru Priotitas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah. Agenda: Penyampaian aspirasi terkait	Komisi X DPR RI mengapresiasi narasumber yang menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan guru dan akan mendesak Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB RI, BKN dan Kemendagri untuk melakukan moratorium pengangkatan formasi baru agar menuntaskan pengangkatan P1 di tahun 2024. Selain itu juga mendorong untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam percepatan penyelesaian pengangkatan P1 di tiap daerah Tahun 2024.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		permasalahan pendidikan		
6.	Pakar Pendidikan: Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. Pd. (UPIBandung), dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB. RDP/RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Pakar Pendidikan: Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M. Pd. (UPI Bandung), dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.	Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI memberikan apresiasi pada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan dan saran mengenai biaya pendidikan dan akan mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI untuk menyusun mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran pendidikan. Selain itu juga mendorong untuk melibatkan komisi lain di DPR untuk mengevaluasi bersama pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, serta membuat kajian efisiensi alokasi dana cadangan pada postur anggaran yang menggunakan dana pendidikan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; 4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 5. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik.	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024. 1. Pembahasan mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025; 2. Pembentukan 3 (tiga) Panja: a) Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah, b) Panja Inflasi dan Nilai Tukar, dan c) Panja Penerimaan (Perpajakan).	Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Plt. Kepala BPS menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan penjelasan atas Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI. 2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati melanjutkan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi (tiga) yaitu:	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			a. Panitia Kerja (Panja) Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah; b. Panitia Kerja (Panja) Panja Inflasi dan Nilai Tukar; c. Panja Penerimaan (Perpajakan).	
2.	Rapat Panja dengan: 1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Bank Indonesia; 4. Otoritas Jasa Keuangan; 5. Badan Pusat Statistik.	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024.	Pembahasan Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah.	Tertutup.
3.	Rapat Panja Kementerian Keuangan	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024.	Pembahasan Panja Penerimaan (Perpajakan).	Tertutup.
4.	Rapat Panja dengan: 1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Bank Indonesia; 4. Otoritas Jasa Keuangan; 5. Badan Pusat Statistik.	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024.	Pembahasan Panja Inflasi dan Nilai Tukar.	Tertutup.
5.	Rapat Panja dengan: 1. Kementerian Keuangan;	Rapat dilaksanakan tanggal 6 Juni 2024.	Pembahasan Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah.	Tertutup.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Bank Indonesia; 4. Otoritas Jasa Keuangan; 5. Badan Pusat Statistik.			
6.	Rapat Panja Kementerian Keuangan	Rapat dilaksanakan tanggal 6 Juni 2024.	Pembahasan Panja Penerimaan (Perpajakan).	Tertutup.
7.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; 4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 5. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik.	Rapat dilaksanakan tanggal 6 Juni 2024. 1. Laporan 3 (tiga) Panja: a) Panja Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah, b) Panja Inflasi dan Nilai Tukar, dan c) Panja Penerimaan (Perpajakan). 2. Pengambilan Keputusan mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan, menyepakati: 1. Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025, sebagai berikut:	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT					KETERANGAN
			NO	INDIKATOR	BESARAN	HASIL PANJA	KEPUTUSAN	
			ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO					
			1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,1 – 5,5	5,1 – 5,5	5,1 – 5,5	
			2	Inflasi (% YoY)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	
			3	Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/US Dollar)	15.300 – 16.000	15.300 – 15.900	15.300 – 15.900	
			4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3		6,9 - 7,2	
			TARGET PEMBANGUNAN					
			1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0		4,5 - 5,0	
			2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0		7,0 - 8,0	
			3	Kemiskinan Ekstrem (%)			0	
			4	Gini Rasio (indeks)	0,379 - 0,382		0,379 - 0,382	
			5	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56		0,56	
			INDIKATOR PEMBANGUNAN					

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN	
			1	Nilai Tukar Petani (indeks)	113 - 115		115 - 120	
			2	Nilai Tukar Nelayan (indeks)	104 - 105		105 - 108	
8.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan	Rapat dilaksanakan tanggal 10 Juni 2024.	Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, menyepakati:					

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN															
		Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan RI mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan dalam KEM-PPKF Tahun 2025. Pendalaman materi mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan dalam KEM-PPKF Tahun 2025 akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Keuangan. 																
9.	Rapat Dengar Pendapat dengan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 	Rapat dilaksanakan tanggal 10 Juni 2024. Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Eselon I Kementerian Keuangan.	Komisi XI DPR RI bersama Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menyepakati: <ol style="list-style-type: none"> Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Eselon I Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;">A. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 1099 1825 1342"> <thead> <tr> <th data-bbox="1059 1106 1126 1182">NO</th> <th data-bbox="1126 1106 1563 1182">PROGRAM</th> <th data-bbox="1563 1106 1816 1182">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1059 1182 1126 1225">1</td> <td data-bbox="1126 1182 1563 1225">Kebijakan Fiskal</td> <td data-bbox="1563 1182 1816 1225">320.852.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1059 1225 1126 1268">2</td> <td data-bbox="1126 1225 1563 1268">Pengelolaan Penerimaan Negara</td> <td data-bbox="1563 1225 1816 1268">1.444.942.620.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1059 1268 1126 1311">3</td> <td data-bbox="1126 1268 1563 1311">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1563 1268 1816 1311">5.434.668.825.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1059 1311 1126 1342"></td> <td data-bbox="1126 1311 1563 1342">Jumlah</td> <td data-bbox="1563 1311 1816 1342">6.879.932.297.000</td> </tr> </tbody> </table> 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	320.852.000	2	Pengelolaan Penerimaan Negara	1.444.942.620.000	3	Dukungan Manajemen	5.434.668.825.000		Jumlah	6.879.932.297.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																	
1	Kebijakan Fiskal	320.852.000																	
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	1.444.942.620.000																	
3	Dukungan Manajemen	5.434.668.825.000																	
	Jumlah	6.879.932.297.000																	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN															
			<p>DJP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan upaya-upaya integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan, penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dan implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk meningkatkan <i>tax ratio</i>. 2) Insentif perpajakan terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. 3) DJP menyampaikan analisa kebijakan dan <i>roadmap</i> target <i>tax ratio</i> yang lebih tinggi yaitu: 12% sampai dengan 23% PDB. Disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2025. <p>B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 914 1827 1145"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PROGRAM</th> <th>JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kebijakan Fiskal</td> <td>16.913.786.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengelolaan Penerimaan Negara</td> <td>927.629.250.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dukungan Manajemen</td> <td>2.574.407.871.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>3.518.950.907.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJBC memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kinerja pelayanan ekspor dan impor yang ditunjukkan dengan indeks efisiensi waktu dan biaya. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	16.913.786.000	2	Pengelolaan Penerimaan Negara	927.629.250.000	3	Dukungan Manajemen	2.574.407.871.000		Jumlah	3.518.950.907.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																	
1	Kebijakan Fiskal	16.913.786.000																	
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	927.629.250.000																	
3	Dukungan Manajemen	2.574.407.871.000																	
	Jumlah	3.518.950.907.000																	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>2) Meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai yang memperhatikan kenyamanan publik dan penyempurnaan proses bisnis yang lebih baik.</p> <p>3) Meningkatkan edukasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>4) Mengoptimalkan penerimaan negara melalui upaya-upaya pengawasan, penegakan hukum, ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.</p> <p>C. Badan Kebijakan Fiskal Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 730 1818 1010"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 730 1126 805">NO</th> <th data-bbox="1126 730 1585 805">PROGRAM</th> <th data-bbox="1585 730 1818 805">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1048 805 1126 911">1</td> <td data-bbox="1126 805 1585 911">Kebijakan Fiskal</td> <td data-bbox="1585 805 1818 911">33.915.098.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 911 1126 970">2</td> <td data-bbox="1126 911 1585 970">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1585 911 1818 970">44.469.802.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 970 1126 1010"></td> <td data-bbox="1126 970 1585 1010">Jumlah</td> <td data-bbox="1585 970 1818 1010">78.384.900.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>BKF memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Memperkuat perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai formulasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional.</p> <p>2) Mempertajam perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai kriteria belanja yang berkualitas (<i>spending better</i>) untuk setiap Kementerian/Lembaga.</p>	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	33.915.098.000	2	Dukungan Manajemen	44.469.802.000		Jumlah	78.384.900.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025														
1	Kebijakan Fiskal	33.915.098.000														
2	Dukungan Manajemen	44.469.802.000														
	Jumlah	78.384.900.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																		
			<p>3) Menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>4) Kebijakan Belanja Perpajakan yang optimal dalam menjaga pendapatan negara.</p> <p>D. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 582 1834 922"> <thead> <tr> <th data-bbox="1050 582 1135 730">NO</th> <th data-bbox="1135 582 1617 730">PROGRAM</th> <th data-bbox="1617 582 1834 730">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1050 730 1135 770">1</td> <td data-bbox="1135 730 1617 770">Kebijakan Fiskal</td> <td data-bbox="1617 730 1834 770">2.197.506.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 770 1135 810">2</td> <td data-bbox="1135 770 1617 810">Pengelolaan Penerimaan Negara</td> <td data-bbox="1617 770 1834 810">5.810.218.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 810 1135 850">3</td> <td data-bbox="1135 810 1617 850">Pengelolaan Belanja Negara</td> <td data-bbox="1617 810 1834 850">17.053.704.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 850 1135 890">4</td> <td data-bbox="1135 850 1617 890">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1617 850 1834 890">53.340.393.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 890 1135 922"></td> <td data-bbox="1135 890 1617 922">Jumlah</td> <td data-bbox="1617 890 1834 922">78.401.821.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJA memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya-upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertajam nomenklatur program-program belanja Kementerian/Lembaga. b. Mempertajam definisi klasifikasi Rincian <i>Output</i> Belanja Kementerian/Lembaga. c. Pencantuman lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada setiap program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	2.197.506.000	2	Pengelolaan Penerimaan Negara	5.810.218.000	3	Pengelolaan Belanja Negara	17.053.704.000	4	Dukungan Manajemen	53.340.393.000		Jumlah	78.401.821.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																				
1	Kebijakan Fiskal	2.197.506.000																				
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	5.810.218.000																				
3	Pengelolaan Belanja Negara	17.053.704.000																				
4	Dukungan Manajemen	53.340.393.000																				
	Jumlah	78.401.821.000																				

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 2) Kebijakan penetapan tarif PNPB yang optimal untuk meningkatkan pendapatan negara. 3) Memperkuat perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai dengan sinkronisasi belanja pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 4) Kebijakan blokir <i>Automatic Adjustment</i> disertai dengan kriteria, syarat dan ketentuan yang jelas. 3. <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) DJP, DJBC, BKF, dan DJA disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2025. 4. Nilai Kinerja Organisasi DJP dan DJBC disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2025. 5. DJP, DJBC, BKF, dan DJA menyampaikan indikasi program/kegiatan inisiatif baru pada Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya, sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 11 Juni 2024. 6. DJP, DJBC, BKF, dan DJA memperkuat dan mempertajam kualitas belanja agar lebih efektif dan efisien. 7. Persetujuan Pagu Indikatif DJP, DJBC, BKF, dan DJA akan dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 11 Juni 2024. 8. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 	
10.	Rapat Dengar Pendapat dengan:	Rapat dilaksanakan tanggal 11 Juni 2024.	Komisi XI DPR RI bersama Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPPK, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN															
	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; 7. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Eselon I Kementerian Keuangan.	Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala LNSW Kementerian Keuangan, menyepakati: 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPPK, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala LNSW Kementerian Keuangan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Eselon I Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025. 2. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebagai berikut: A. Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) <table border="1" data-bbox="1048 914 1832 1145"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 919 1122 994">NO</th> <th data-bbox="1122 919 1547 994">PROGRAM</th> <th data-bbox="1547 919 1825 994">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 994 1122 1031">1</td> <td data-bbox="1122 994 1547 1031">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1547 994 1825 1031">33.183.961.256.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1031 1122 1067"></td> <td data-bbox="1122 1031 1547 1067">a. <i>Setjen (Tanpa BLU)</i></td> <td data-bbox="1547 1031 1825 1067">29.249.808.205.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1067 1122 1104"></td> <td data-bbox="1122 1067 1547 1104">b. <i>BLU LPDP</i></td> <td data-bbox="1547 1067 1825 1104">3.934.153.051.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1104 1122 1141">Jumlah</td> <td data-bbox="1122 1104 1547 1141"></td> <td data-bbox="1547 1104 1825 1141">33.183.961.256.000</td> </tr> </tbody> </table> Setjen dan BLU LPDP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1) Setjen meningkatkan kinerja pengelolaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan responsif.	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Dukungan Manajemen	33.183.961.256.000		a. <i>Setjen (Tanpa BLU)</i>	29.249.808.205.000		b. <i>BLU LPDP</i>	3.934.153.051.000	Jumlah		33.183.961.256.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																	
1	Dukungan Manajemen	33.183.961.256.000																	
	a. <i>Setjen (Tanpa BLU)</i>	29.249.808.205.000																	
	b. <i>BLU LPDP</i>	3.934.153.051.000																	
Jumlah		33.183.961.256.000																	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
	<p>8. Kementerian Keuangan; dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan.</p>		<p>2) Setjen meningkatkan penerapan <i>shared services</i> untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.</p> <p>3) BLU LPDP memperkuat kebijakan afirmasi program beasiswa untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, siswa dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan bidang-bidang strategis untuk pelayanan publik.</p> <p>4) BLU LPDP meningkatkan transparansi bisnis proses dalam menjalankan program beasiswa.</p> <p>5) BLU LPDP meningkatkan kinerja program-program riset dan inovasi, yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan produktif ekonomi, industri, dan UMKM.</p> <p>6) BLU LPDP Pengelolaan portofolio investasi Dana Abadi, dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, menjaga <i>good governance</i>, risiko, dan mendapatkan surplus yang optimal.</p> <p>B. Inspektorat Jenderal Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 986 1832 1265"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 991 1128 1070">NO</th> <th data-bbox="1128 991 1507 1070">PROGRAM</th> <th data-bbox="1507 991 1825 1070">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 1070 1128 1185">1</td> <td data-bbox="1128 1070 1507 1185">Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</td> <td data-bbox="1507 1070 1825 1185">3.291.628.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1185 1128 1225">2</td> <td data-bbox="1128 1185 1507 1225">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1507 1185 1825 1225">63.868.407.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 1225 1507 1265">Jumlah</td> <td data-bbox="1507 1225 1825 1265">67.160.035.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Itjen memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p>	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3.291.628.000	2	Dukungan Manajemen	63.868.407.000	Jumlah		67.160.035.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025														
1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3.291.628.000														
2	Dukungan Manajemen	63.868.407.000														
Jumlah		67.160.035.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																					
			<p>1) Menjaga terlaksananya tata kelola, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan akuntabilitas, pelayanan, dan integritas yang tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>2) Menjamin terlaksananya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan keuangan negara.</p> <p>3) Meningkatkan kinerja Sistem Pengawasan Keuangan Negara terintegrasi.</p> <p>C. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN (BLU PKN STAN) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 730 1827 1042"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 735 1128 807">NO</th> <th data-bbox="1128 735 1592 807">PROGRAM</th> <th data-bbox="1592 735 1821 807">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 807 1128 842">1</td> <td data-bbox="1128 807 1592 842">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1592 807 1821 842">553.699.935.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1128 842 1592 877"><i>a. BPPK (Tanpa BLU)</i></td> <td data-bbox="1592 842 1821 877">417.946.700.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1128 877 1592 912"><i>b. BLU PKN STAN</i></td> <td data-bbox="1592 877 1821 912">135.753.235.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1128 912 1592 962">• <i>Rupiah Murni</i></td> <td data-bbox="1592 912 1821 962">120.727.301.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1128 962 1592 997">• <i>PNBP BLU</i></td> <td data-bbox="1592 962 1821 997">15.025.934.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 997 1128 1042">Jumlah</td> <td data-bbox="1128 997 1592 1042"></td> <td data-bbox="1592 997 1821 1042">553.699.935.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>BPPK dan BLU PKN STAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatkan kualitas edukasi keuangan negara khususnya kepada pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan pengelola keuangan negara di Kementerian/Lembaga.</p> <p>2) Memperkuat pembangunan karakter mahasiswa yang memiliki kompetensi dan karakter perekat bangsa.</p>	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Dukungan Manajemen	553.699.935.000		<i>a. BPPK (Tanpa BLU)</i>	417.946.700.000		<i>b. BLU PKN STAN</i>	135.753.235.000		• <i>Rupiah Murni</i>	120.727.301.000		• <i>PNBP BLU</i>	15.025.934.000	Jumlah		553.699.935.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																							
1	Dukungan Manajemen	553.699.935.000																							
	<i>a. BPPK (Tanpa BLU)</i>	417.946.700.000																							
	<i>b. BLU PKN STAN</i>	135.753.235.000																							
	• <i>Rupiah Murni</i>	120.727.301.000																							
	• <i>PNBP BLU</i>	15.025.934.000																							
Jumlah		553.699.935.000																							

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																								
			<p>D. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS), BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPD LH) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 507 1830 890"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 512 1128 584">NO</th> <th data-bbox="1128 512 1547 584">PROGRAM</th> <th data-bbox="1547 512 1825 584">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 584 1128 660">1</td> <td data-bbox="1128 584 1547 660">Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</td> <td data-bbox="1547 584 1825 660">88.397.593.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 660 1128 699">2</td> <td data-bbox="1128 660 1547 699">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1547 660 1825 699">7.618.794.541.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 699 1128 737"></td> <td data-bbox="1128 699 1547 737">a. DJPb (Tanpa BLU)</td> <td data-bbox="1547 699 1825 737">1.397.414.924.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 737 1128 775"></td> <td data-bbox="1128 737 1547 775">b. BLU PIP</td> <td data-bbox="1547 737 1825 775">95.640.778.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 775 1128 813"></td> <td data-bbox="1128 775 1547 813">c. BLU BPDPKS</td> <td data-bbox="1547 775 1825 813">6.056.135.600.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 813 1128 852"></td> <td data-bbox="1128 813 1547 852">d. BLU BPD LH</td> <td data-bbox="1547 813 1825 852">69.603.239.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 852 1128 890">Jumlah</td> <td data-bbox="1547 852 1825 890">7.707.192.134.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJPB dan BLU PIP, BLU BPDPKS, serta BLU BPD LH memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DJPB meningkatkan kinerja pengelolaan APBN yang berkualitas melalui mekanisme pembayaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2) DJPB meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang disediakan oleh BLU bagi masyarakat. 3) Kebijakan BLU untuk menyediakan layanan publik yang optimal. 4) Meningkatkan kinerja BLU PIP yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan investasi, aksesibilitas modal bagi UMKM, dan suku bunga yang optimal dan rendah. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	88.397.593.000	2	Dukungan Manajemen	7.618.794.541.000		a. DJPb (Tanpa BLU)	1.397.414.924.000		b. BLU PIP	95.640.778.000		c. BLU BPDPKS	6.056.135.600.000		d. BLU BPD LH	69.603.239.000	Jumlah		7.707.192.134.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																										
1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	88.397.593.000																										
2	Dukungan Manajemen	7.618.794.541.000																										
	a. DJPb (Tanpa BLU)	1.397.414.924.000																										
	b. BLU PIP	95.640.778.000																										
	c. BLU BPDPKS	6.056.135.600.000																										
	d. BLU BPD LH	69.603.239.000																										
Jumlah		7.707.192.134.000																										

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN															
			<p>5) Meningkatkan kinerja BLU BPD PKS untuk mengoptimalkan produktivitas sawit rakyat, SDM Sawit, kemitraan, dan kemudahan akses petani sawit.</p> <p>6) Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat diperuntukan untuk alokasi dana Rp60 juta/Ha dan target luasan sebesar 120.000 Ha.</p> <p>7) Meningkatkan kinerja BLU BPD LH dalam mengelola imbal hasil pendanaan PNB P, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>E. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 767 1832 997"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PROGRAM</th> <th>JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kebijakan Fiskal</td> <td>4.950.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengelolaan Belanja Negara</td> <td>28.399.139.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dukungan Manajemen</td> <td>47.708.130.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>81.057.269.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJPK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. 2) Mempertajam kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. 3) Mempertajam Kebijakan penggunaan DBH cukai hasil tembakau sehingga dapat juga diberikan kepada petani cengkeh. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	4.950.000.000	2	Pengelolaan Belanja Negara	28.399.139.000	3	Dukungan Manajemen	47.708.130.000	Jumlah		81.057.269.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																	
1	Kebijakan Fiskal	4.950.000.000																	
2	Pengelolaan Belanja Negara	28.399.139.000																	
3	Dukungan Manajemen	47.708.130.000																	
Jumlah		81.057.269.000																	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																					
			<p>4) Kebijakan untuk menjaga kualitas belanja daerah.</p> <p>F. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BLU Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (BLU LDKPI) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 547 1832 930"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PROGRAM</th> <th>JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kebijakan Fiskal</td> <td>895.363.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</td> <td>31.638.999.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dukungan Manajemen</td> <td>89.402.680.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. DJPPR (Tanpa BLU)</td> <td>46.388.760.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. BLU LDKPI</td> <td>43.013.920.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>121.937.042.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJPPR dan BLU LDKPI memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk menjaga kemampuan keuangan negara yang tetap sehat dimasa yang akan datang. 2) Strategi pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk antara lain mencapai pendalaman pasar SBN dan penurunan <i>yield</i>. 3) Dukungan pendanaan/pembiayaan IKN memperhatikan proporsional kontribusi investor sebagaimana yang direncanakan dalam <i>roadmap</i> pembangunan IKN. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Kebijakan Fiskal	895.363.000	2	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	31.638.999.000	3	Dukungan Manajemen	89.402.680.000		a. DJPPR (Tanpa BLU)	46.388.760.000		b. BLU LDKPI	43.013.920.000	Jumlah		121.937.042.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																							
1	Kebijakan Fiskal	895.363.000																							
2	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	31.638.999.000																							
3	Dukungan Manajemen	89.402.680.000																							
	a. DJPPR (Tanpa BLU)	46.388.760.000																							
	b. BLU LDKPI	43.013.920.000																							
Jumlah		121.937.042.000																							

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																		
			<p>4) Mengoptimalkan kinerja pengelolaan imbal hasil pendanaan PNBPN BLU LDKPI.</p> <p>G. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1048 547 1832 874"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PROGRAM</th> <th>JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</td> <td>114.811.566.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dukungan Manajemen</td> <td>723.344.238.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. DJKN (Tanpa BLU)</td> <td>559.873.238.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. BLU LMAN</td> <td>163.471.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>838.155.804.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>DJKN dan BLU LMAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pengelolaan kekayaan negara diarahkan untuk memperkuat ekonomi sektor negara. 2) Implementasi <i>roadmap</i> BUMN untuk memperkuat ekonomi sektor negara. 3) Implementasi <i>roadmap</i> BMN Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. 4) BLU LMAN mengoptimalkan manfaat finansial dan non finansial dalam mengelola aset negara. <p>H. Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW)</p>	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	114.811.566.000	2	Dukungan Manajemen	723.344.238.000		a. DJKN (Tanpa BLU)	559.873.238.000		b. BLU LMAN	163.471.000.000	Jumlah		838.155.804.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025																				
1	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	114.811.566.000																				
2	Dukungan Manajemen	723.344.238.000																				
	a. DJKN (Tanpa BLU)	559.873.238.000																				
	b. BLU LMAN	163.471.000.000																				
Jumlah		838.155.804.000																				

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>Usulan Pagu adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 363 1834 563"> <thead> <tr> <th data-bbox="1050 363 1133 443">NO</th> <th data-bbox="1133 363 1599 443">PROGRAM</th> <th data-bbox="1599 363 1834 443">JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1050 443 1133 483">1</td> <td data-bbox="1133 443 1599 483">Pengelolaan Penerimaan Negara</td> <td data-bbox="1599 443 1834 483">8.076.113.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 483 1133 523">2</td> <td data-bbox="1133 483 1599 523">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1599 483 1834 523">78.479.760.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 523 1133 563"></td> <td data-bbox="1133 523 1599 563">Jumlah</td> <td data-bbox="1599 523 1834 563">86.555.873.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>LNSW memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kinerja pelayanan ekspor – impor dan logistik yang efisien dan akuntabel untuk mendukung penerimaan negara. 3. <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) SETJEN, ITJEN, BPPK, DJPB, DJPK, DJPPR, DJKN, dan LNSW disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2025. 4. SETJEN, ITJEN, BPPK, DJPB, DJPK, DJPPR, DJKN, dan LNSW memperkuat dan mempertajam kualitas belanja agar lebih efektif dan efisien. 5. Persetujuan Pagu Indikatif SETJEN, ITJEN, BPPK, DJPB, DJPK, DJPPR, DJKN, dan LNSW akan dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 11 Juni 2024. 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPPK, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala LNSW Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 	NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengelolaan Penerimaan Negara	8.076.113.000	2	Dukungan Manajemen	78.479.760.000		Jumlah	86.555.873.000	
NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU INDIKATIF 2025														
1	Pengelolaan Penerimaan Negara	8.076.113.000														
2	Dukungan Manajemen	78.479.760.000														
	Jumlah	86.555.873.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan	Rapat dilaksanakan tanggal 11 Juni 2024. Pengambilan Keputusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan atas Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Senin – Selasa, 10-11 Juni 2024. 2. Arah Kebijakan dalam program dan kegiatan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> A. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DJP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan upaya-upaya integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan, penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dan implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk meningkatkan <i>tax ratio</i>. 2) Insentif perpajakan terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) DJBC memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kinerja pelayanan ekspor dan impor yang ditunjukkan dengan indeks efisiensi waktu dan biaya. 2) Meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai yang memperhatikan kenyamanan publik dan penyempurnaan proses bisnis yang lebih baik. 3) Meningkatkan edukasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4) Mengoptimalkan penerimaan negara melalui upaya-upaya pengawasan, penegakan hukum, ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.</p> <p>C. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) BKF memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai formulasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional. 2) Mempertajam perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai kriteria belanja yang berkualitas (<i>spending better</i>) untuk setiap Kementerian/Lembaga. 3) Menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 4) Kebijakan Belanja Perpajakan yang optimal dalam menjaga pendapatan negara. <p>D. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) DJA memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya-upaya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertajam nomenklatur program-program belanja Kementerian /Lembaga. b. Mempertajam definisi klasifikasi Rincian <i>Output</i> Belanja Kementerian/Lembaga. c. Pencantuman lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada setiap program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2) Kebijakan penetapan tarif PNPB yang optimal untuk meningkatkan pendapatan negara.</p> <p>3) Memperkuat perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai dengan sinkronisasi belanja pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.</p> <p>4) Kebijakan blokir <i>Automatic Adjustment</i> disertai dengan kriteria, syarat dan ketentuan yang jelas.</p> <p>E. Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) Setjen dan BLU LPDP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Setjen meningkatkan kinerja pengelolaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan responsif.</p> <p>2) Setjen meningkatkan penerapan <i>shared services</i> untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.</p> <p>3) BLU LPDP memperkuat kebijakan afirmasi program beasiswa untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, siswa dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan bidang-bidang strategis untuk pelayanan publik.</p> <p>4) BLU LPDP meningkatkan transparansi bisnis proses dalam menjalankan program beasiswa.</p> <p>5) BLU LPDP meningkatkan kinerja program-program riset dan inovasi, yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan produktif ekonomi, industri, dan UMKM.</p> <p>6) BLU LPDP, pengelolaan portofolio investasi Dana Abadi, dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>hatian, menjaga <i>good governance</i>, risiko, dan mendapatkan surplus yang optimal.</p> <p>F. Inspektorat Jenderal Itjen memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1) Menjaga terlaksananya tata kelola, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan akuntabilitas, pelayanan, dan integritas yang tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. 2) Menjamin terlaksananya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan keuangan negara. 3) Meningkatkan kinerja Sistem Pengawasan Keuangan Negara terintegrasi.</p> <p>G. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN (BLU PKN STAN) BPPK dan BLU PKN STAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas edukasi keuangan negara khususnya kepada pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan pengelola keuangan negara di Kementerian/Lembaga. 2) Memperkuat pembangunan karakter mahasiswa yang memiliki kompetensi dan karakter perekat bangsa.</p> <p>H. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS), BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPD LH) DJPB dan BLU PIP, BLU BPDPKS, serta BLU BPD LH memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1) DJPB meningkatkan kinerja pengelolaan APBN yang berkualitas melalui mekanisme pembayaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2) DJPB meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang disediakan oleh BLU bagi masyarakat. 3) Kebijakan BLU untuk menyediakan layanan publik yang optimal. 4) Meningkatkan kinerja BLU PIP yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan investasi, aksesibilitas modal bagi UMKM, dan suku bunga yang optimal dan rendah. 5) Meningkatkan kinerja BLU BPD PKS untuk mengoptimalkan produktivitas sawit rakyat, SDM Sawit, kemitraan, dan kemudahan akses petani sawit. 6) Mengusulkan kepada Komite Pengarah kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat diperuntukan untuk alokasi dana Rp60 juta/Ha dan target luasan sebesar 120.000 Ha. 7) Meningkatkan kinerja BLU BPD LH dalam mengelola imbal hasil pendanaan PNB, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup. <p>I. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. 2) Mempertajam kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3) Mempertajam Kebijakan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sehingga dapat juga diberikan kepada petani cengkeh.</p> <p>4) Kebijakan untuk menjaga kualitas belanja daerah.</p> <p>J. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BLU Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (BLU LDKPI) DJPPR dan BLU LDKPI memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk menjaga kemampuan keuangan negara yang tetap sehat dimasa yang akan datang. 2) Strategi pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk antara lain mencapai pendalaman pasar SBN dan penurunan <i>yield</i>. 3) Dukungan pendanaan/pembiayaan IKN memperhatikan proporsional kontribusi investor sebagaimana yang direncanakan dalam <i>roadmap</i> pembangunan IKN. 4) Mengoptimalkan kinerja pengelolaan imbal hasil pendanaan PNBPN BLU LDKPI. <p>K. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) DJKN dan BLU LMAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pengelolaan kekayaan negara diarahkan untuk memperkuat ekonomi sektor negara. 2) Penyusunan <i>roadmap</i> BUMN untuk memperkuat ekonomi sektor negara. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3) Penyusunan <i>roadmap</i> BMN Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.</p> <p>4) BLU LMAN mengoptimalkan manfaat finansial dan non finansial dalam mengelola aset negara.</p> <p>L. Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) LNSW memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatkan kinerja pelayanan ekspor – impor dan logistik yang efisien dan akuntabel untuk mendukung penerimaan negara.</p> <p>3. <i>Key Performace Indicators</i> (KPI) Kementerian Keuangan disampaikan saat pembahasan Nota Keuangan Tahun 2025.</p> <p>4. Kementerian Keuangan menyampaikan indikasi program/kegiatan inisiatif baru pada Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya.</p> <p>5. Kementerian Keuangan memperkuat dan mempertajam kualitas belanja agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>6. DJP menyampaikan analisa kebijakan dan <i>roadmap</i> target <i>tax ratio</i> yang lebih tinggi.</p> <p>7. Kementerian Keuangan akan mengefektifkan dan mengefisienkan pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp53.195.389.273.000,00 (<i>Lima Puluh Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah</i>), dengan memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dalam APBN 2025.</p>	
12.	Rapat Konsultasi Ketua Badan Pemeriksa	Rapat dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024.	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPK RI Tahun Anggaran 2025.	Tertutup.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
	Keuangan Republik Indonesia (Ketua BPK RI) dengan Komisi XI DPR RI															
13.	Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PPN/Bappenas.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN TA 2025) sebesar Rp1.970.952.577.000,00 (<i>Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut: (dalam rupiah) <table border="1" data-bbox="1048 1038 1816 1278"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 1038 1126 1098">NO</th> <th data-bbox="1126 1038 1503 1098">NAMA PROGRAM</th> <th data-bbox="1503 1038 1816 1098">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1048 1098 1126 1174">1</td> <td data-bbox="1126 1098 1503 1174">Perencanaan Pembangunan Nasional</td> <td data-bbox="1503 1098 1816 1174">1.131.431.961.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1174 1126 1225">2</td> <td data-bbox="1126 1174 1503 1225">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1503 1174 1816 1225">839.520.616.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1048 1225 1503 1278">Total</td> <td data-bbox="1503 1225 1816 1278">1.970.952.577.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: (dalam rupiah)</p>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025	1	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131.431.961.000	2	Dukungan Manajemen	839.520.616.000	Total		1.970.952.577.000	
NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025														
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131.431.961.000														
2	Dukungan Manajemen	839.520.616.000														
Total		1.970.952.577.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 288 1547 320">FUNGSI</th> <th data-bbox="1547 288 1825 320">PAGU ANGGARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1048 320 1547 360">055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</td> <td data-bbox="1547 320 1825 360">1.970.952.577.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 360 1547 400">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td> <td data-bbox="1547 360 1825 400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 400 1547 477">Program Perencanaan Pembangunan Nasional</td> <td data-bbox="1547 400 1825 477">1.131.431.961.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 477 1547 517">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1547 477 1825 517">839.520.616.000</td> </tr> </tbody> </table>		FUNGSI	PAGU ANGGARAN	055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.970.952.577.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM		Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131.431.961.000	Program Dukungan Manajemen	839.520.616.000																						
FUNGSI	PAGU ANGGARAN																																			
055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.970.952.577.000																																			
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																																				
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.131.431.961.000																																			
Program Dukungan Manajemen	839.520.616.000																																			
			<p>Dengan masing-masing eselon I Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 660 1122 735">No</th> <th data-bbox="1122 660 1547 735">Eselon I</th> <th data-bbox="1547 660 1825 735">Jumlah Pagu Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1048 735 1122 775">1</td> <td data-bbox="1122 735 1547 775">Deputi bidang Ekonomi</td> <td data-bbox="1547 735 1825 775">53.614.074.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 775 1122 815">2</td> <td data-bbox="1122 775 1547 815">Deputi bidang Regional</td> <td data-bbox="1547 775 1825 815">67.032.991.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 815 1122 895">3</td> <td data-bbox="1122 815 1547 895">Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam</td> <td data-bbox="1547 815 1825 895">362.183.077.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 895 1122 971">4</td> <td data-bbox="1122 895 1547 971">Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan</td> <td data-bbox="1547 895 1825 971">25.290.146.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 971 1122 1083">5</td> <td data-bbox="1122 971 1547 1083">Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan</td> <td data-bbox="1547 971 1825 1083">48.572.727.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1083 1122 1123">6</td> <td data-bbox="1122 1083 1547 1123">Deputi bidang Sarana Prasarana</td> <td data-bbox="1547 1083 1825 1123">72.853.034.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1123 1122 1200">7</td> <td data-bbox="1122 1123 1547 1200">Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</td> <td data-bbox="1547 1123 1825 1200">38.432.134.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1200 1122 1276">8</td> <td data-bbox="1122 1200 1547 1276">Deputi bidang Pendanaan Pembangunan</td> <td data-bbox="1547 1200 1825 1276">53.203.808.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1276 1122 1386">9</td> <td data-bbox="1122 1276 1547 1386">Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</td> <td data-bbox="1547 1276 1825 1386">75.221.440.000</td> </tr> </tbody> </table>		No	Eselon I	Jumlah Pagu Anggaran	1	Deputi bidang Ekonomi	53.614.074.000	2	Deputi bidang Regional	67.032.991.000	3	Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	362.183.077.000	4	Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	25.290.146.000	5	Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	48.572.727.000	6	Deputi bidang Sarana Prasarana	72.853.034.000	7	Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	38.432.134.000	8	Deputi bidang Pendanaan Pembangunan	53.203.808.000	9	Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	75.221.440.000		
No	Eselon I	Jumlah Pagu Anggaran																																		
1	Deputi bidang Ekonomi	53.614.074.000																																		
2	Deputi bidang Regional	67.032.991.000																																		
3	Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	362.183.077.000																																		
4	Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	25.290.146.000																																		
5	Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	48.572.727.000																																		
6	Deputi bidang Sarana Prasarana	72.853.034.000																																		
7	Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	38.432.134.000																																		
8	Deputi bidang Pendanaan Pembangunan	53.203.808.000																																		
9	Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	75.221.440.000																																		

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN									
			<table border="1" data-bbox="1048 288 1827 480"> <tr> <td data-bbox="1048 288 1122 363">10</td> <td data-bbox="1122 288 1547 363">Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - PPN</td> <td data-bbox="1547 288 1827 363">335.028.530.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 363 1122 438">11</td> <td data-bbox="1122 363 1547 438">Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - DM</td> <td data-bbox="1547 363 1827 438">820.970.616.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 438 1122 480">12</td> <td data-bbox="1122 438 1547 480">Inspektorat Utama</td> <td data-bbox="1547 438 1827 480">18.550.000.000</td> </tr> </table> <p data-bbox="1048 523 1883 667">3. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan kepada Komisi XI DPR RI, program-program K/L yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri pada saat pembahasan Nota Keuangan 2025. (Program, K/L terkait, dan besarnya nilai Pinjaman Luar Negeri).</p> <p data-bbox="1048 703 1883 890">4. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui fungsi pengendalian, meningkatkan implementasi belanja negara yang berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), dan mengevaluasi lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari RKA seluruh K/L pada APBN Tahun Anggaran 2025.</p> <p data-bbox="1048 927 1883 1145">5. Menteri PPN/Kepala Bappenas, melalui fungsi perencanaan, mempertajam penyusunan RKP dan anggaran pada Tahun Anggaran 2025, yang ditunjukkan dengan penguatan belanja prioritas, program dan kegiatan yang lebih produktif, serta menunjukkan kaitan target-target RPJMN, RKP, program K/L, dan alokasi anggarannya.</p> <p data-bbox="1048 1182 1883 1362">6. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertajam nomenklatur program-program belanja Kementerian /Lembaga; </p>	10	Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - PPN	335.028.530.000	11	Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - DM	820.970.616.000	12	Inspektorat Utama	18.550.000.000	
10	Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - PPN	335.028.530.000											
11	Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas - DM	820.970.616.000											
12	Inspektorat Utama	18.550.000.000											

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertajam definisi klasifikasi Rincian <i>Output</i> Belanja Kementerian/Lembaga; ▪ Pencantuman lokus Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada setiap program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. <p>b. Memperkuat perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai formulasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional.</p> <p>c. Mempertajam perumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan yang disertai kriteria belanja yang berkualitas (<i>spending better</i>) untuk setiap Kementerian/Lembaga.</p> <p>d. Memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.</p> <p>e. Mempertajam kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>7. Komisi XI DPR RI mendukung usulan Kementerian PPN/Bappenas mengajukan tambahan anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 sebesar Rp804.475.039.000,00 (Delapan Ratus Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan diarahkan untuk memperkuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional; b. Pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD. c. Biaya gaji dan operasional pegawai baru. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN												
			<p>untuk diusulkan dalam RAPBN TA 2025 dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN Tahun 2025.</p> <p>8. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>													
14.	<p>Rapat Dengar Pendapat dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS); 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan 3. Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 	<p>Rapat dilaksanakan tanggal 13 Juni 2024.</p> <p>Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p>	<p>Komisi XI DPR RI bersama Plt. Kepala BPS, Kepala BPKP, Kepala LKPP dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Plt. Kepala BPS, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif BPS, BPKP, dan LKPP Tahun 2025. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN TA 2025) sebesar Rp4.609.674.256.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut: (dalam rupiah) <table border="1" data-bbox="1048 1062 1832 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 1062 1133 1142">NO</th> <th data-bbox="1133 1062 1565 1142">NAMA PROGRAM</th> <th data-bbox="1565 1062 1832 1142">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1048 1142 1133 1217">1</td> <td data-bbox="1133 1142 1565 1217">Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</td> <td data-bbox="1565 1142 1832 1217">1.082.776.754.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1048 1217 1133 1267">2</td> <td data-bbox="1133 1217 1565 1267">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1565 1217 1832 1267">3.526.897.502.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1048 1267 1565 1318">Total</td> <td data-bbox="1565 1267 1832 1318">4.609.674.256.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik Tahun</p>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025	1	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.082.776.754.000	2	Dukungan Manajemen	3.526.897.502.000	Total		4.609.674.256.000	
NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025														
1	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.082.776.754.000														
2	Dukungan Manajemen	3.526.897.502.000														
Total		4.609.674.256.000														

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN										
			<p>Anggaran 2025, sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 360 1830 588"> <thead> <tr> <th data-bbox="1050 360 1565 400">FUNGSI</th> <th data-bbox="1565 360 1830 400">PAGU INDIKATIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1050 400 1565 440">054 Badan Pusat Statistik</td> <td data-bbox="1565 400 1830 440">4.609.674.256.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 440 1565 480">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td> <td data-bbox="1565 440 1830 480"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 480 1565 552">Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</td> <td data-bbox="1565 480 1830 552">1.082.776.754.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 552 1565 588">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1565 552 1830 588">3.526.897.502.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. BPS memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan statistik resmi lintas sektoral yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i>; Mendukung penyediaan data tematik kepada Komisi XI DPR RI. Data tematik sesuai bidang Komisi XI DPR RI; BPS akan menindaklanjuti substansi yang menjadi perhatian Komisi XI DPR RI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. <p>4. Komisi XI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif BPS dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 sebesar Rp2.237.882.826.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), yang diarahkan untuk memperkuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan untuk <i>OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy</i>; Memenuhi <i>baseline</i> kegiatan Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyek Prioritas, dan Pendukung Proyek Prioritas; dan 	FUNGSI	PAGU INDIKATIF	054 Badan Pusat Statistik	4.609.674.256.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM		Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.082.776.754.000	Program Dukungan Manajemen	3.526.897.502.000	
FUNGSI	PAGU INDIKATIF													
054 Badan Pusat Statistik	4.609.674.256.000													
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM														
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.082.776.754.000													
Program Dukungan Manajemen	3.526.897.502.000													

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																		
			<p>c. Mamastikan ketersediaan dan keberlanjutan 45 indikator pembangunan. untuk diusulkan dalam RAPBN TA 2025 dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN TA 2025.</p> <p>5. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Indikatif BPKP dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN TA 2025) sebesar Rp2.263.743.926.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 767 1825 1072"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 770 1133 884">NO</th> <th data-bbox="1133 770 1489 884">NAMA PROGRAM</th> <th data-bbox="1489 770 1821 884">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 884 1133 959">1</td> <td data-bbox="1133 884 1489 959">Pengawasan Pembangunan</td> <td data-bbox="1489 884 1821 959">496.497.971.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 959 1133 1015">2</td> <td data-bbox="1133 959 1489 1015">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1489 959 1821 1015">1.767.245.955.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 1015 1489 1069">Total</td> <td data-bbox="1489 1015 1821 1069">2.263.743.926.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif BPKP Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 1222 1832 1369"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 1225 1496 1262">FUNGSI</th> <th data-bbox="1503 1225 1827 1262">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 1262 1496 1337">089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td> <td data-bbox="1503 1262 1827 1337">2.263.743.926.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1337 1496 1369">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td> <td data-bbox="1503 1337 1827 1369"></td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengawasan Pembangunan	496.497.971.000	2	Dukungan Manajemen	1.767.245.955.000	Total		2.263.743.926.000	FUNGSI	PAGU INDIKATIF 2025	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.263.743.926.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM		
NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025																				
1	Pengawasan Pembangunan	496.497.971.000																				
2	Dukungan Manajemen	1.767.245.955.000																				
Total		2.263.743.926.000																				
FUNGSI	PAGU INDIKATIF 2025																					
089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.263.743.926.000																					
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																						

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN	
				Program Pengawasan Pembangunan	496.497.971.000	
				Program Dukungan Manajemen	1.767.245.955.000	
			<p>6. BPKP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pengawasan BPKP terhadap akuntabilitas dan efektifitas program-program pembangunan Pemerintah; b. Menjamin kualitas belanja Pemerintah untuk menciptakan nilai tambah, produktif mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi APBN, serta APBD. c. Menyampaikan kepada Komisi XI DPR RI laporan <i>review</i> pengawasan BPKP atas program-program pembangunan Pemerintah. <p>7. Komisi XI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif BPKP dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 sebesar Rp210.140.436.000,00 (<i>Dua Ratus Sepuluh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah</i>), dan diarahkan untuk memperkuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan isu strategis; b. Pengawasan atas akuntabilitas keuangan; c. Pengawasan atas akuntabilitas pembangunan SDM; d. Pengawasan atas akuntabilitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan e. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. untuk diusulkan dalam RAPBN TA 2025 dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN TA 2025. 			

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																						
			<p>8. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Indikatif LKPP dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN TA 2025) sebesar Rp166.711.994.000,00 (<i>Seratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah</i>), dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 582 1830 844"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 585 1131 659">NO</th> <th data-bbox="1131 585 1525 659">NAMA PROGRAM</th> <th data-bbox="1525 585 1825 659">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 659 1131 734">1</td> <td data-bbox="1131 659 1525 734">Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td> <td data-bbox="1525 659 1825 734">36.209.371.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 734 1131 790">2</td> <td data-bbox="1131 734 1525 790">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1525 734 1825 790">130.502.623.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 790 1525 841">Total</td> <td data-bbox="1525 790 1825 841">166.711.994.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan fungsi Pagu Indikatif LKPP Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: (dalam rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1050 994 1830 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 997 1547 1070">FUNGSI</th> <th data-bbox="1547 997 1825 1070">PAGU INDIKATIF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 1070 1547 1145">106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</td> <td data-bbox="1547 1070 1825 1145">166.711.994.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 1145 1547 1185">01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1185 1547 1259">Pengadaan Barang /Jasa Nasional</td> <td data-bbox="1547 1185 1825 1259">36.209.371.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1259 1547 1294">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1547 1259 1825 1294">130.502.623.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. LKPP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:</p>	NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025	1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	36.209.371.000	2	Dukungan Manajemen	130.502.623.000	Total		166.711.994.000	FUNGSI	PAGU INDIKATIF 2025	106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	166.711.994.000	01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM		Pengadaan Barang /Jasa Nasional	36.209.371.000	Program Dukungan Manajemen	130.502.623.000	
NO	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2025																								
1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	36.209.371.000																								
2	Dukungan Manajemen	130.502.623.000																								
Total		166.711.994.000																								
FUNGSI	PAGU INDIKATIF 2025																									
106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	166.711.994.000																									
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM																										
Pengadaan Barang /Jasa Nasional	36.209.371.000																									
Program Dukungan Manajemen	130.502.623.000																									

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan barang produk dalam negeri; b. Meningkatkan TKDN; c. Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro Kecil – Koperasi (UMK-K); d. Membangun e-katalog yang mempermudah pengguna (<i>user friendly</i>). <p>10. Komisi XI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif LKPP dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 sebesar Rp83.250.846.000,00 (<i>Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah</i>), dan diarahkan untuk memperkuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan dan harmonisasi peraturan pelaksana UU PBJ Publik; b. Penyelenggaraan operasional dan layanan serta penguatan sistem pengadaan digital dan pasar pengadaan digital; c. Pembinaan SDM dan <i>stakeholder</i> PBJ dan pembangunan kapabilitas K/L/Pemda untuk pencegahan korupsi pengadaan; dan d. Penguatan sumber daya, peningkatan layanan dan sarana prasarana. <ul style="list-style-type: none"> untuk diusulkan dalam RAPBN TA 2025 dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN TA 2025. <p>11. Plt. Kepala BPS, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 3 Juni 2024.	Persetujuan Perubahan Jadwal Komisi XI DPR RI; dan Pengambilan Keputusan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.	Tertutup.
2.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 13 Juni 2024.	Membahas Hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus perihal Anggota BPK; dan lain-lain.	Tertutup.

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.	Rapat Dengar Pendapat Umum <i>Fit and Proper Test</i> Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Rapat dilaksanakan tanggal 3 Juni 2024.	<p>Komisi XI DPR RI telah melakukan <i>Fit and Proper Test</i> kepada Sdri. Destry Damayanti, sebagai calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, dengan makalah dan paparan yang berjudul: “Bank Indonesia: Sinergi Untuk Mendukung Indonesia Maju”. Adapun isi makalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia akan semakin tinggi, sehingga sifat adaptif dan inovatif saja tidak cukup dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan adanya SINERGI baik dalam kebijakan maupun implementasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, Otoritas Lembaga Lainnya, industri (yang diwakili asosiasi), akademisi dan Lembaga terkait lainnya. • Tantangan ekonomi dan Keuangan, Pemulihan ekonomi global berjalan lambat, di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan <i>decoupling</i> inflasi antar negara EM dan DM yang berpotensi mendorong <i>uncertain and divergent policy</i>. • Meningkatnya inflasi, mendorong Bank sentral negara maju terutama <i>The Fed</i> melakukan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu lama (<i>high for longer</i>), otoritas moneter 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tantangan yang dihadapi juga semakin meningkat sejalan dengan pesatnya <i>megatrend</i>, Megatren global tersebut akan mewarnai • kondisi ekonomi dan sosial ke depan. Perkembangan teknologi dan digital dapat Memberikan manfaat namun juga membawa tantangan tersendiri yang perlu dihadapi dengan seksama dengan maraknya penggunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>, <i>robotic era</i>, dan <i>machine learning</i> di tengah ancaman <i>cybercrime</i>. • Dari aspek Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), kondisi SSK juga relatif masih solid. Ekspansi yang terjadi juga terjadi pada sektor Usaha Mikro, hal ini ditandai dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga April 2024 (ytd) mencapai Rp90,4 T atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp53,93 T. • Penyaluran kredit yang relatif baik, juga tidak lepas dari kondisi permodalan bank yang masih kuat, potensi penyaluran kredit juga masih cukup terbuka mengingat likuiditas perbankan masih relatif <i>ample</i>. • Semua tantangan menjadi konsideran utama bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan, berdasarkan UU PPSK, BI memiliki 3 tujuan utama (mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan), yang semuanya diarahkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Sejalan dengan ekosistem PUVA, kewenangan Bank Indonesia meliputi penerbitan produk dan mekanisme transaksi, perizinan dan perilaku pelaku pasar, mekanisme pembentukan harga acuan, dan pengembangan infrastruktur PUVA. • Penguatan Tugas dan Kewenangan BI dalam UU P2SK terdapat 3 area Kebijakan Utama yaitu; - menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan – Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan, - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Adapun Penegasan/ penguatan kewenangan BI mencakup antar lain: - Kebijakan makroprudensial, - Pengaturan, Pengawasan, dan Pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk transaksi derivatif PUVA, - Pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan dan Pengelolaan dan perolehan dan dan / atau informasi. • Respon Kebijakan dalam bauran kebijakan Bank Indonesia dan Penguatan kedepan terus memperkuat bauran kebijakan melalui sinergi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. • Kebijakan moneter mencakup: suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi, stabilitas Nilai Tukar, Implementasi OM Pro <i>Market</i>, Mendukung kebijakan pemerintah terkait DHE (TD DHE) dan Koordinasi TPID, TPIP dan GNPIP. • Kebijakan Makroprudensial mencakup: Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), Pelonggaran PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial), Pelonggaran Rasio LTV, Insentif atas pembiayaan inklusif (RPIM) dan Penguatan surveilians. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Sistem Pembayaran mencakup: Peningkatan akseptasi digital termasuk efektifitas QRIS, Pengembangan SP dan 3I (Intekoneksi, <i>Interoperable</i> dan Integrasi), Kerja sama <i>Crossborder</i> Pembayaran, Penguatan struktur industri SP. • Kebijakan Pengembangan Pasar uang dan Pasar Valas dalam mendukung pembiayaan ekonomi, Penguatan <i>Blueprint</i> pengembangan Pasar uang sebagai peta jalan untuk menciptakan <i>well-functioning</i> market dalam rangka mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter dan sebagai fondasi dari stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. • Penguatan Sistem Pembayaran pada Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan dengan memperhatikan potensi digital Indonesia, Bank Indonesia merespon dengan 3 fokus kebijakan sistem pembayaran, yaitu: -Menjaga stabilitas infrastruktur SP, -Memperkuat industri SP yang sehat, -Memperluas akseptasi digital. • Kebijakan Makroprudensial yang akomodatif diarahkan untuk bersifat akomodatif melalui perluasan kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) per 1 Juni 2024. • Sinergi untuk mendukung Indonesia Maju dilakukan Bauran Kebijakan Nasional bersinergi dengan Pemerintah /otoritas/industri diarahkan untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia maju. Terdapat 5 respon bauran Kebijakan Ekonomi Nasional yaitu: Koordinasi Fiskal dan Moneter, - Akselerasi Transformasi Sektor Keuangan, - Akselerasi Transformasi Sektor Riil, - Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan dan, - Ekonomi dan Keuangan Hijau, semua ini tercakup dengan tujuan Ketahanan, Pertumbuhan dan Berkelanjutan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi Kebijakan Pasar Keuangan yang akan dilakukan yaitu: - Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO), <i>National Working Group For Benchmark Reform</i> (NWGBR), Satuan Tugas Nasional <i>Local Currency Transaction</i> (LCT). • Sinergi Kebijakan Sistem Pembayaran dilakukan dengan; - Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) • Sinergi dalam mendorong UMKM Nasional dilakukan upaya UMKM Go Digital yaitu, - <i>e-Farming</i>, - <i>e-financing Support</i>, - <i>e-Commerce</i> • Sinergi dalam mendorong UMKM Nasional dilakukan Upaya UMKM Go, <i>Export</i> yaitu: - Indonesia SME HUB dan, <i>Trading House</i> • Untuk mendorong perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dilakukan sinergi dan inovasi dalam Program BI. terdapat 3 Strategi Utama Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah: Penyelarasan Strategi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional & Daerah yaitu: - Penguatan Ekosistem Produk Halal, - Penguatan Akses Keuangan Syariah, - Penguatan Penerapan Halal <i>Lifestyle</i>. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU / INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	---	Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR ke Venezuela, Selasa 28 Mei 2024 s/d Senin 3 Juni 2024.	Agenda acara Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen dalam rangka Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.	
2.	---	Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR ke Kuba, Kamis 6 Juni 2024 s/d Rabu 12 Juni 2024.	Agenda acara Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen dalam rangka Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.	
3.	Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Audiensi Pimpinan Badan Legislasi DPR (Wakil Ketua Ach. Baidowi) yang didampingi oleh Anggota Badan Legislasi Sdr. Amin AK. dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jumat, 7 Juni 2024 pukul 14.30 WIB dengan agenda acara konsultasi mengenai rencana usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan konsultasi mengenai rencana usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). 2. Pimpinan Badan Legislasi DPR (Wakil Ketua Ach. Baidowi) menyambut baik dan memberikan masukan kepada Ketua KPPU terkait usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). 	
4.	Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Audiensi Sekretariat Badan Legislasi DPR RI dengan Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kamis, 13 Juni 2024 pukul 13.00 WIB dengan agenda acara konsultasi mengenai rencana usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti permohonan audiensi dari Kepala Biro Hukum Sekretariat KPPU sebagaimana surat yang disampaikan kepada Badan Legislasi Nomor 113/SJ.2/S/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Permohonan Audiensi dan menerima rombongan 	

NO	JUDUL RUU / INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)	<p>dengan didampingi oleh 10 orang Tim Ahli Badan Legislasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Pimpinan Badan Legislasi (Wakil Ketua Ach. Baidowi) yang didampingi oleh Anggota Badan Legislasi Sdr. Amin AK. dengan Ketua KPPU pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 14.30 – 14.45. WIB. 3. Berdasarkan hasil diskusi, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat masuk dalam Prolegnas Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat KPPU menjelaskan juga hal-hal yang melatarbelakangi pengusulan RUU tersebut dan Tenaga Ahli Baleg memberikan masukan kepada KPPU terkait subtansi-substansi lain atas usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). 	
5.	DPRD Kabupaten Bengkayang	Audiensi Badan Legislasi DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bengkayang, Kamis, 20 Juni 2024 pukul 13.00 WIB dengan agenda acara terkait Konsultasi layanan Sistem Legislasi (SILEG).	<p>Dengan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD Kabupaten Bengkayang mengapresiasi penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Sekretariat Baleg terkait dengan Sistem Informasi Legislasi (SILEG). 2. DPRD Kabupaten Bengkayang berusaha untuk dapat membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Teknologinya saat ini seperti yang ada di DPR RI. 	

NO	JUDUL RUU / INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Sistem Informasi dan SOP yang ada di DPRD Kabupaten Bengkayang akan mengadopsi Sistem Informasi yang ada di DPR RI.</p> <p>4. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi mengapresiasi kegiatan kunjungan ini dan mengharapkan dengan adanya audiensi ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi DPRD Kabupaten Bengkayang.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Namibia tanggal 2 – 8 Juni 2024.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana mengadakan kunjungan diplomasi ke Namibia guna memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Hugua (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI 2. Ela Siti Nuryamah (F-PKB), Anggota BKSAP DPR RI 3. Hasani Bin Zuber (F-PD), Anggota BKSAP DPR RI 4. Muslim (F-PD), Anggota BKSAP DPR RI <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Majelis Nasional Namibia, H.E. Prof. Katjavivi <p>Dalam rangkaian kegiatan kunjungan diplomasi ke Namibia, Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) mengadakan pertemuan dengan H.E. Prof. Katjavivi, Ketua Majelis Nasional Namibia pada hari Selasa (04/06/2024). Ketua Majelis Nasional Namibia, H.E. Prof Katjavivi menyampaikan bahwa Indonesia dan Namibia memiliki hubungan yang sangat erat. Pihaknya juga menyampaikan bahwa semangat konferensi Asia – Afrika turut menyulut perjuangan kemerdekaan Namibia. Kedua pihak sepakat bahwa hubungan yang telah erat tersebut dapat terus berkembang dan memperkuat hubungan dan kerja sama pada berbagai bidang.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana mengapresiasi eratnya hubungan Indonesia dan Namibia yang telah terjalin hingga saat ini.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Semangat Konferensi Asia – Afrika dan Dasasila Bandung dapat menjadi pendorong penguatan kerja sama antar Indonesia – Namibia dan kerja sama antar-kawasan. Ketua Delegasi juga mengutarakan bahwa kedua pihak perlu saling menggali potensi di bidang pengelolaan energi dan sumber daya, pendidikan, pertanian, perikanan, pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP juga menekankan kembali pentingnya kerja sama dan saling dukung antar-parlemen antara DPR RI dan Parlemen Namibia dalam forum – forum parlemen internasional, khususnya <i>Inter-Parliamentary Union</i> guna mengawal kepentingan bersama negara berkembang.</p> <p>2. Ketua Dewan Nasional Namibia, H.E. Mr. Lukas Muha Melanjutkan agenda pertemuan pada kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI, delegasi mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Nasional (<i>National Council</i>) Namibia, H.E. Mr. Lukas Muha pada hari Selasa (04/06/2024).</p> <p>Ketua Dewan Nasional Namibia mengapresiasi kunjungan yang diadakan oleh BKSAP DPR RI yang merupakan kunjungan balasan pertama setelah beberapa kunjungan delegasi Namibia ke Indonesia. Pertemuan lalu membahas penyiapan MoU antara Dewan Nasional Namibia dengan DPR RI dalam kerja sama antar-parlemen dan <i>capacity building</i> serta penguatan kerja sama di bidang pendidikan, distribusi air dan ketahanan pangan.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP berterima kasih atas penerimaan yang hangat oleh Ketua Dewan Nasional Namibia dan menyatakan bahwa DPR RI dan Dewan Nasional Namibia perlu terus mempererat hubungan kerja sama guna menjembatani kepentingan masyarakat kedua negara. Wakil Ketua BKSAP juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengakselerasi proses MoU antara DPR RI dan Dewan Nasional Namibia. Kedua pihak juga sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama distribusi air, pendidikan dan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>peningkatan skill. Wakil Ketua BKSAP juga berharap agar Namibia dapat melalui bencana kekeringan yang melanda sejak bulan Mei 2024.</p> <p>3. Dinapama (Perusahaan Tekstil) Delegasi BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan dengan Dinapama <i>Manufacturing and Supplies</i> pada hari Selasa (04/06/2024).</p> <p>Dinapama merupakan salah satu produsen garmen terkemuka di Namibia, yang mayoritas produknya menggunakan bahan baku impor dari Indonesia. Delegasi disambut oleh Managing Director Dinapama, Mr. David Namalenga yang menyampaikan bahwa Dinapama telah melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan tekstil Indonesia atas fasilitasi oleh KBRI Windhoek.</p> <p>Pertemuan dilanjutkan oleh peninjauan pabrik oleh Delegasi BKSAP DPR RI.</p> <p>4. KBRI Windhoek dan masyarakat RI di Namibia Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) menghadiri jamuan makan malam oleh Duta Besar LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, Y.M. Wisnu Edi Pratignyo dan jajaran KBRI Windhoek (03/06/2024).</p> <p>Dalam sambutannya, selain memberikan paparan terkait tugas dan fungsi Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Wakil Ketua BKSAP DPR RI selaku ketua delegasi juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan parlemen dalam memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara – negara non tradisional, salah satunya Namibia. Selain didasari oleh ikatan sejarah yang kuat antara kedua negara melalui Konferensi Asia – Afrika dan Gerakan Non-Blok, peningkatan kerja sama antara kedua negara hendaknya juga didasari oleh semangat penguatan hubungan antar-masyarakat RI - Namibia.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Keesokan harinya, delegasi mengikuti <i>morning brief</i> dari Duta Besar RI dan jajaran KBRI Windhoek terkait isu – isu mutakhir, <i>pending matters</i> dan perkembangan hubungan bilateral RI – Namibia dan RI – Angola. Delegasi juga berkesempatan memberikan masukan terkait penguatan hubungan bilateral RI – Namibia serta utilisasi potensi kerja sama kedua negara.</p> <p>Dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembuka dari rangkaian agenda kunjungan diplomasi BKSAP DPR RI ke Namibia. Delegasi BKSAP DPR RI beranggotakan Hugua (F-PDIP), Ela Siti Nuryamah (F-PKB), Hasani bin Zuber (F-PD) dan Muslim (F-PD)</p>	
2.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB Tanzania tanggal 2 – 8 Juni 2024.	<p>Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Tanzania yang dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengadakan kunjungan GKSB ke Tanzania. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Harris Turino (F-PDIP) 2. Masinton Pasaribu (F-PDIP) 3. Andi Achmad Dara (F-PG) 4. Trifena Tinal (F-PG) 5. Dr. Sukamta (F-PKS) 6. Dr. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Parlemen Tanzania, H.E. Ms. Tulia Ackson <p>Dalam kunjungan Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen Tanzania yang dipimpin oleh Dr. Fadli.Zon (F.P.Gerindra) ke Tanzania, delegasi juga berkesempatan melakukan Pertemuan dengan Ketua Parlemen Tanzania, Ms. Tulia Ackson yang juga adalah Presiden <i>Inter Parliamentary Union</i> (IPU) Indonesia (4/6/2024).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Ketua Parlemen Tanzania menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB dan berharap kunjungan ini akan dapat meningkatkan hubungan baik di antara kedua parlemen.</p> <p>Beliau juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dalam pencalonannya sebagai kandidat Presiden IPU. Indonesia dipandang sangat aktif dalam organisasi parlemen dunia tersebut dalam memperjuangkan berbagai hal yang menjadi perhatian dunia.</p> <p>Beliau juga memberikan apresiasi kepada Dubes Indonesia di Dar Essalam atas kinerjanya selama ini, sehingga hubungan baik antara Tanzania dan Indonesia terus meningkat.</p> <p>Ketua Delegasi menyampaikan bahwa Indonesia baru saja menyelenggarakan sidang <i>World Water Forum</i> dimana DPR RI juga menyelenggarakan <i>side event</i> terkait <i>water</i> tersebut yang dihadiri sekitar 50 parlemen negara sahabat.</p> <p>Disampaikan pula tahun depan akan ada peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika dan DPR RI juga berencana untuk membuat forum antar parlemen dalam peringatan KAA tersebut.</p> <p>Diharapkan hubungan baik antar kedua parlemen akan terus meningkat dengan saling kunjung antara kedua parlemen.</p> <p>2. Tanzania – Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i> Agenda Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen Tanzania yang dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (F.P.Gerindra) dilanjutkan dengan melakukan Pertemuan dengan Grup Persahabatan Tanzania - Indonesia yang dipimpin oleh Ketuanya yaitu Prof. Patrick Ndakidemi beserta anggota grup di Dodoma, Tanzania (4/6/2024).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Parlemen Tanzania menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB dan berharap kunjungan ini akan dapat meningkatkan hubungan baik di antara kedua parlemen. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama parlemen Indonesia yang dirasa sangat tepat mengingat Pemimpin Kedua negara juga telah melakukan saling kunjung baru-baru ini.</p> <p>Hubungan baik antara kedua negara telah terjalin sejak Presiden RI yang pertama yaitu Ir. Sorkarno dan Presiden Julius Nyerere yang berteman baik dan aktif dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.</p> <p>Dalam diskusi dengan parlemen disampaikan mekanisme dan proses yang berlangsung di parlemen kedua negara dalam menjalankan peran sebagai representasi masyarakat.</p> <p>Ada beberapa perbedaan namun kedua parlemen memiliki fungsi yang sama yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.</p> <p>Hubungan bilateral yang sangat baik antara Indonesia dengan Tanzania yang telah terjalin baik sejak lama perlu ditingkatkan dalam kerja sama nyata dalam berbagai bidang, termasuk dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan berbagai bidang lainnya di antara kedua negara, sehingga lebih memberikan manfaat nyata kepada rakyat kedua negara.</p> <p>Berbagai hal juga dibahas dalam pertemuan tersebut termasuk peluang peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi, budaya, pariwisata, peluang kerja sama <i>sister city</i>, <i>program capacity building</i> dan peningkatan <i>people to people exchange</i>.</p> <p>Pada akhir pertemuan Ketua GKSB mengundang Parlemen Tanzania untuk dapat berkunjung juga ke Indonesia.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Menteri Sumber Daya Alam & Pariwisata, Ms. Angellah Kairuki Menteri menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB dan berharap kunjungan ini akan dapat meningkatkan hubungan baik di antara kedua negara, terutama dalam bidang pariwisata.</p> <p>Tanzania memiliki obyek wisata yang sangat banyak, antara lain dari sisi alam, pantai, kunjungan ke taman-taman nasional dan juga penyelenggaraan lomba maraton, dan lainnya.</p> <p>Indonesia dan Tanzania sama- sama memiliki banyak destinasi wisata dan diharapkan kedua negara dapat mengambil <i>best practice</i> sehingga bisa meningkatkan pariwisata di kedua negara.</p> <p>Ibu Menteri juga menyampaikan pentingnya konektivitas antar negara dengan adanya penerbangan langsung atau penambahan rute pesawat menuju obyek-obyek wisata. Tanzania juga berharap Indonesia dapat memberikan <i>capacity building</i> utk SDM dalam bidang pariwisata seperti <i>hospitality service</i>, dan sebagainya. Selain itu, menteri juga menyampaikan usulan apabila kedua negara dapat saling mempromosikan pariwisata, misalnya dengan menayangkan video destinasi wisata dalam penerbangan Indonesia dan sebaliknya.</p> <p>Delegasi sependapat bahwa banyak peluang kerja sama yang dapat ditingkatkan dalam bidang pariwisata ini. Mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan banyak keragaman budaya, alam yang indah dan juga banyak peninggalan kuno yang dapat menarik wisatawan seperti candi borobudur, candi prambanan, keanekaragaman batik, wisata kuliner, wisata budaya, dan lain lain.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tanzania memiliki hewan <i>big five</i> yang terkenal, Taman Nasional Serengeti dan Kilimanjaro, sementara Indonesia juga memiliki Komodo yang hanya ada di Pulau Komodo, juga keindahan pantai di Labuan Bajo dan banyak tempat lainnya.</p> <p>Ketua delegasi juga menyampaikan usulan peningkatan promosi pariwisata misalnya dengan melibatkan influencer, sehingga informasi tentang destinasi wisata dapat disebarluaskan dengan lebih baik.</p>	
3.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Belgia dengan Duta Besar Belgia tanggal 4-6 Juni 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Belgia yang dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih (F-PKS) menerima kunjungan kehormatan (<i>courtesy call</i>) dari Duta Besar Belgia untuk Indonesia H.E. Mr. Frank Felix di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada siang ini (4/6/2024).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Ketua GKSB mengapresiasi hubungan diplomatik antar kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun. Duta Besar Belgia menyambut baik capaian hubungan diplomatik tersebut dengan mengagendakan sejumlah <i>event</i> kebudayaan yang akan digelar pada November mendatang.</p> <p>Sebagai informasi, Indonesia dan Belgia telah menjalin berbagai kerja sama baik di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, diplomasi hingga bidang energi. Saat ini komoditas ekspor Indonesia ke Belgia di antaranya kopi, teh, tembakau, rempah dan alas kaki. Dubes Felix juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa perusahaan Belgia di Indonesia bergerak pada sektor energi dan berharap dapat meningkatkan kerja sama ekonomi pada sektor strategis lainnya.</p> <p>Indonesia dan Belgia juga memiliki komitmen yang sama untuk mendesak gencatan senjata (<i>ceasefire</i>) segera dipatuhi Israel. Belgia juga telah menjadi</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>salah satu negara yang aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menyuarakan kemerdekaan Palestina.</p> <p>Sebelum pertemuan berakhir, Ketua GKSB dan Duta Besar Belgia sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan di antaranya yang sudah berjalan antara universitas-universitas di Belgia dengan sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, melalui berbagai kerja sama penelitian, pertukaran pelajar, dan beasiswa VLIR-UOS. Dalam waktu dekat, KU Leuven <i>University</i> akan menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.</p>	
4.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Fiji tanggal 10 Juni 2024.	<p>GKSB DPR RI – Parlemen Fiji yang dipimpin oleh H. Mohamad Muraz, SH, MM (F-PD) mengadakan Rapat Internal di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/6/2024).</p> <p>Rapat Internal tersebut membahas rencana kegiatan dan kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Fiji ke Suva. Disepakati bahwa GKSB Fiji akan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Fiji untuk Indonesia dalam waktu dekat guna membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara dan kerja sama diberbagai bidang termasuk hubungan antar-parlemen.</p>	
5.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Portugal tanggal 10 Juni 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Portugal, yang dipimpin oleh Sukur H. Nababan, S.T (F-PDIP) menggelar rapat internal di Ruang Rapat BKSAP, Gd. Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/6/2024).</p> <p>Rapat tersebut membahas terkait pertemuan dengan Duta Besar Portugal untuk Indonesia dan rencana kunjungan ke Portugal. Turut hadir, Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Portugal di antaranya Krisdayanti (F-PDIP), H. Sulaeman L. Hamzah (F-PNasdem), Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si. (F-PAN), serta H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si (F-PKS).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Portugal dengan Duta Besar Portugal untuk Indonesia tanggal 12 Juni 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Portugal menerima kunjungan kehormatan (<i>courtesy call</i>) dari Duta Besar Portugal untuk Indonesia, H.E. Miguel de Mascarenhas de Calheiros Velozo di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/6/2024). Pertemuan ini membahas potensi kerja sama bilateral dan rencana kunjungan GKSB ke Parlemen Portugal.</p> <p>Memimpin pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Portugal Krisdayanti (F-PDIP) menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin antar kedua pihak dari waktu ke waktu. Hubungan baik tersebut tercermin dari berbagai kerja sama yang dijalankan, mulai dari ekonomi yang meliputi ekspor-impor, perjanjian ekonomi komprehensif, pertanian, isu pembangunan, demokrasi, dan komitmen pelestarian lingkungan.</p> <p>Duta Besar Portugal menyampaikan bahwa urgensi saling kunjung antar kedua negara akan memberi dampak pada pengetahuan kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Hal ini terlihat pada capaian kerja sama “Indonesia-Portugal <i>Business Forum: Exploring Potential Partnerships</i>,” yang dihadiri oleh lebih dari 40 pelaku usaha di wilayah Lisabon dan sekitarnya serta proyek Tenaga Surya terapung EDP di Waduk Duriangkang, Kepulauan Batam.</p> <p>Menutup pertemuan ini, Duta Besar Miguel menyampaikan bahwa segala perencanaan terkait kerja sama harus dilaksanakan atau diambil tindakan yang konkret demi kebaikan bersama. Kedepannya, Indonesia dan Portugal diharapkan dapat terus menjalin hubungan baik serta menjaga sikap kooperatif untuk keberhasilan kedua belah pihak.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Portugal lainnya, di antaranya H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si.(F-PKS), dr.h. Slamet (F-PKS), H. Sulaeman L. Hamzah (F-PNasDem). Setelah pertemuan berakhir, Duta Besar Portugal diajak berkeliling ke Museum DPR dan mengunjungi Ruang Paripurna DPR RI.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP & GKSB RRT menerima kunjungan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional tanggal 13 Juni 2024.	<p>Pimpinan BKSAP bersama Ketua GKSB DPR RI-Parlemen menerima kunjungan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (13/06/2024).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (F-Gerindra) mengapresiasi dukungan NPC kepada DPR RI dalam berbagai forum parlemen tingkat dunia, terutama dalam berbagai <i>emergency item</i> terkait Palestina.</p> <p>Ketua Delegasi Hon. Mr. Fu Ziying menyampaikan harapannya agar kerja sama kedua negara dapat terus berlangsung dengan nilai-nilai saling percaya, saling menguntungkan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Delegasi juga mengapresiasi capaian kerja sama kedua negara diberbagai bidang perdagangan, ekonomi dan investasi, termasuk di antaranya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC).</p> <p>Kedepannya Indonesia -Tiongkok berkomitmen meningkatkan peluang kerja sama lintas sektor lainnya, meliputi ekspor-impor dan pembangunan infrastruktur, pendidikan, penelitian, pariwisata, budaya, teknologi dan digitalisasi serta keamanan dan stabilitas kawasan.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut yang terdiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (FPD), Gilang Dhielafararez (FPDIP), Sukamta (FPKS), serta Ketua GKSB DPR RI - Parlemen RRT Puteri Anne Komaruddin (FPG), dan Anggota BKSAP Muslim (FPD).</p>	
8.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Delegasi Thailand-Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i> tanggal 13 Juni 2024.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PDemokrat) melaksanakan <i>Friendly Talk</i> dengan Delegasi dari Parlemen Thailand yang diketuai oleh Hon. Mr. Rangsiman Rome. <i>Friendly Talk</i> digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (13/6/2024). Pertemuan ini membahas potensi kerja sama dan penguatan hubungan bilateral, dikemukakan juga bahwa perlunya hubungan yang terus ditingkatkan bagi kebaikan bersama. Turut hadir dalam	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertemuan ini, H. Sukamta, Ph. D. (F-PKS) selaku Wakil Ketua BKSAP, Khilmi (F-PGerindra) selaku Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Thailand, dan anggota Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc. (F-PGerindra).</p> <p>Pertemuan ini mendiskusikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memperkuat hubungan bilateral dan mengembangkan kerja sama komprehensif. Kedua pihak sepakat dalam usaha untuk pengarusutamaan hubungan antar parlemen. Di tingkat kawasan, Thailand dan Indonesia sebagai dua negara yang memiliki peranan besar harus berkolaborasi dan mengajak negara lain di ASEAN untuk bekerja sama dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar demi terciptanya demokrasi dan stabilitas dalam tingkat kawasan, hal ini dapat dijalankan melalui diplomasi parlemen dalam forum parlemen regional dan internasional. Konektivitas ASEAN juga menjadi prioritas kedua pihak, guna memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi masyarakat kedua negara tapi juga seluruh masyarakat ASEAN dikarenakan kondisi yang ada akan mempengaruhi kedua negara.</p> <p>Kedepannya, Indonesia dan Thailand akan berkomitmen untuk mengedepankan sikap kooperatif dan mempromosikan solusi yang damai melalui dialog antar pihak guna mencapai stabilitas kawasan.</p>	
9.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR RI menerima delegasi <i>House Democracy Partnership</i> (HDP) tanggal 19 Juni 2024.	<p>Dr Sukamta (F-PKS) selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI memimpin pertemuan bilateral dengan Delegasi <i>The House Democracy Partnership</i> yang diketuai oleh Mr. Nick J. Rahall yang sempat menjabat sebagai anggota kongres Amerika Serikat pada 1977 - 2015. Pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta pada Rabu (19/6/2024). Pertemuan bilateral ini bermaksud untuk mendiskusikan program pertukaran pemikiran dan informasi yang dilakukan untuk sekretariat parlemen.</p> <p>Pembahasan lainnya, disebutkan juga terkait apresiasi atas hubungan kedua pihak yang telah terjalin dari waktu ke waktu. Kedua pihak juga menyadari pentingnya pengutamaan nilai demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>manusia. Mengenai hal tersebut, Indonesia menyatakan bahwa Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh besar dalam membantu usaha genjatan senjata permanen terkait konflik Israel - Palestina.</p> <p>Pembelajaran akan nilai demokrasi diharapkan juga menjadi pembelajaran bersama oleh kedua negara, berbagi informasi atas kondisi penerapan di masing masing negara akan intensif untuk dilakukan dengan tujuan kemanusiaan.</p>	
10.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR RI menerima kunjungan delegasi Rumania – Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i> tanggal 19 Juni 2024.	<p>Wakil ketua BKSAP DPR RI Dr Sukamta (F-PKS) menerima kunjungan Parlemen Rumania di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (19/06/2024).</p> <p>Dr. Sukamta bertemu dengan delegasi dari Rumania untuk membahas penguatan hubungan kedua negara. Kedua belah pihak sudah mempunyai hubungan diplomatik yang dimulai pada tahun 1950 dan menyatakan keinginan mereka untuk melihat kelanjutan kerja sama di masa depan. Indonesia menyambut baik delegasi Rumania dan menekankan pentingnya diplomasi parlemen dalam membina hubungan baik. Mereka mengusulkan bidang-bidang yang perlu dikolaborasikan seperti keamanan siber, modernisasi militer, pembangunan ekonomi, serta berupaya untuk belajar dari keahlian Rumania dalam bidang-bidang tersebut.</p> <p>Delegasi Rumania membalas sambutan tersebut dengan baik dan menyepakati pentingnya kerja sama ekonomi. Tidak hanya itu, Rumania juga mengakui pentingnya kerja sama di bidang-bidang lainnya seperti keamanan dan layanan kesehatan. Rumania menawarkan untuk berbagi keahlian mereka di bidang keamanan siber dan keamanan nasional, mitigasi penyakit dan kerja sama dalam bidang farmasi. Pertemuan ini menghasilkan visi bersama untuk meningkatkan kolaborasi antar kedua negara. Baik Indonesia maupun Rumania menyatakan minatnya untuk membina hubungan antar masyarakat melalui</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertukaran pelajar dan peneliti. Mereka juga membahas potensi kolaborasi di sektor pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kedua negara.</p> <p>Secara keseluruhan, pertemuan tersebut merupakan langkah positif dalam mempererat hubungan Indonesia dan Rumania. Kedua belah pihak mengidentifikasi beberapa bidang yang berpotensi untuk dikolaborasikan dan sepakat untuk melanjutkan diskusi guna melaksanakan inisiatif ini.</p>	
11.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kanada ke Kanada tanggal 19 – 25 Juni 2024.	<p>Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Sari Yulianti (F-PG) mengadakan kunjungan GKSB ke Kanada. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG) 2. Andi Iwan Darmawan Aras (F-PGerindra) 3. Darizal Basir (F-PD) <p>Dalam kunjungan pertemuan tersebut delegasi berkesempatan mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Parlemen Kanada, H.E. Mr. Greg Fergus, P.C. <p>Ketua Parlemen menyambut hangat kehadiran delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Kanada di ruang kerjanya. Ketua Delegasi menyampaikan terimakasih atas penerimaan yang sangat baik dari Ketua Parlemen Kanada di sela-sela jadwal yang padat menjelang penutupan masa sidang Kanada musim ini.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal di antaranya peluang untuk peningkatan hubungan kerja sama antar parlemen, upaya peningkatan kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, energi baru dan terbarukan, maupun perkembangan IKN.</p> <p>Selain itu, Ketua Delegasi juga menyampaikan dukungan parlemen untuk percepatan penyelesaian Indonesia - Canada <i>Comprehensive Economy</i></p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Partnership Agreement (ICA - CEPA) dan ASEAN - Canada Free Trade Agreement. Termasuk juga dukungan atas Strategi Indo Pacific Kanada. Pada akhir pertemuan, delegasi mengundang parlemen Kanada untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka penguatan hubungan bilateral kedua parlemen. Kunjungan tersebut dapat dilakukan dalam acara inagurasi anggota parlemen terpilih yang akan dilakukan pada 1 Oktober 2024 atau dengan menghadiri seminar nasional partai yang akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang.</i></p> <p>Ketua parlemen menyambut baik undangan yang disampaikan dan menyatakan ingin sekali untuk hadir. Namun demikian karena padatnya berbagai kegiatan internal di Kanada, terutama menjelang Pemilu Parlemen pada musim gugur tahun depan, kemungkinan Ketua Parlemen tidak dapat hadir secara langsung dan mungkin akan mengirim perwakilan untuk datang ke Indonesia.</p> <p>2. <i>Canada – ASEAN Parliamentary Friendship Group</i> Dari pihak ASEAN - Canada <i>Parliamentary Friendship Group</i> hadir Hon. Matt Jeneroux, Sen. Clementsen, Sen. Yuen Pau Woo serta Rod Legget, Direktur urusan Parlemen Kanada.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya peningkatan hubungan kerja sama antar parlemen, upaya peningkatan kolaborasi ekonomi dan perdagangan, peluang penggunaan energi baru dan terbarukan, maupun perkembangan IKN. Termasuk update perkembangan politik dalam negeri Indonesia pasca Pemilu.</p> <p>Penyelesaian pembahasa Indonesia - Canada <i>Comprehensive Economy Partnership Agreement (ICA CEPA) dan ASEAN - Canada Free Trade Agreement</i> juga menjadi perhatian dalam diskusi.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pada akhir pertemuan, delegasi mengundang parlemen Kanada untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka penguatan hubungan bilateral kedua parlemen. Kunjungan tersebut dapat dilakukan dalam acara inaugurasi anggota parlemen terpilih yang akan dilakukan pada 1 Oktober 2024 atau dengan menghadiri seminar nasional partai yang akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang.</p> <p>3. Dubes RI untuk Kanada dan Jajaran KBRI Ottawa Dubes menyambut baik kunjungan delegasi GKSB dan menyampaikan perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia - Kanada dan berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam kunjungan GKSB ini, Dubes menyampaikan bahwa Ketua Parlemen Kanada menyambut baik kunjungan delegasi, demikian pula dari pihak Kanada - ASEAN <i>Parliamentary Friendship Group</i> serta Pejabat Kantor Perdana Menteri Kanada. Kesempatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga hubungan bilateral kedua negara dapat terus meningkat. Delegasi mengapresiasi kinerja dan sambutan hangat Dubes beserta jajaran KBRI Ottawa dalam memberikan dukungan kepada GKSB sehingga semua pertemuan yang diusulkan mendapatkan konfirmasi penerimaan. Pada malam harinya Dubes juga menjamu makan malam delegasi di Wisma Indonesia bersama jajaran KBRI di Ottawa.</p>	
12.	KSI - BKSAP	Pertemuan ke-293 anggota komite eksekutif <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) di Zanzibar, Tanzania tanggal 19 Juni 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif IPU mewakili Asia Pasifik, Dr. Fadli Zon, mengikuti pertemuan rutin Komite Eksekutif IPU ke-293 di Zanzibar, Tanzania pada tanggal 18 - 21 Juni 2024. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden IPU Tulia Ackson ini dihadiri oleh delegasi 12 negara yang mewakili grup-grup Geopolik yang ada di IPU.</p> <p>Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Fadli Zon pada forum tersebut. Pertama, terkait dengan alokasi Dana Solidaritas Parlemen sebagai bantuan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk parlemen-parlemen yang negaranya sedang mengalami kesulitan finansial sehingga berhalangan untuk dapat aktif di IPU, serta negara yang parlemennya belum menjadi anggota IPU karena keterbatasan kemampuan finansial. Terkait dengan Dana Solidaritas Parlemen, Fadli Zon mendukung adanya alokasi bantuan untuk negara-negara Pasifik, sebagaimana yang baru-baru ini diterima oleh Parlemen Vanuatu.</p> <p>Kedua, Fadli Zon meminta agar Sekretaris Jenderal IPU dapat memberikan laporan berkala mengenai perkembangan persiapan rencana keberangkatan Delegasi IPU ke Rafah, dalam rangka mendorong gencatan senjata segera. Rencana kunjungan ke Rafah ini merupakan bentuk tanggung jawab IPU sebagai Organisasi Parlemen Sedunia untuk mengupayakan penghentian segera kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap rakyat Palestina.</p> <p>Fadli Zon juga meminta agar Sekretariat IPU dapat mengikutsertakan perwakilan dari Komite Eksekutif pada rencana kunjungan tersebut.</p>	
13.	KSI BKSAP	Rapat koordinasi Virtual Komite Timur Tengah <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) terkait kunjungan ke Timur Tengah tanggal 21 Juni 2024.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Sukamta, yang menjabat sebagai Anggota Komisi <i>Middle East Question</i> di IPU, berpartisipasi pada pertemuan virtual (<i>zoom meeting</i>) Komite IPU untuk isu Timur Tengah (<i>Committee of Middle East Questions</i>) Kamis (20/6/2024). Presiden Komite IPU untuk Isu Timur Tengah, Mr. H. J. Talsma (Netherland), saat memimpin rapat menegaskan komitmen Komite IPU Timur Tengah yang akan mengunjungi kawasan Timur Tengah</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Sukamta mengatakan, laporan dari kunjungan tersebut harus mudah diakses oleh publik. Output dari kunjungan itu harus merekomendasikan langkah-langkah lanjutan terkait upaya <i>peace-building</i> di Timur Tengah, termasuk di Gaza dan West Bank, kawasan pendudukan.</p> <p>Ia menyesalkan Komite Timur Tengah bersikap sepihak saat menyampaikan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			laporan ke <i>Governing Council</i> pada IPU ke-148. Mengingat laporan tersebut mengklaim telah menyetujui sebuah komunikasi dengan beberapa hal, tapi melepas satu isu penting yakni pertukaran tahanan Palestina, isu yang menjadi kegagalan IPU dalam <i>emergency item</i> . Sementara isu tersebut saat ini telah menjadi kesatuan dalam tawaran gencatan senjata yang disetujui Dewan Keamanan PBB	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Asuransi Jasindo	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 4-6 Juni 2024 ke Kalimantan Selatan.	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit <i>provider</i> belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
2.		Kunjungan Kerja BURT ke Luar Negeri tanggal 7-13 Juni 2024 ke Jepang	<p>Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR RI adalah untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktikkan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan konstituennya. 3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			6. Perencanaan dan implementasi <i>e-parliament</i> . 7. Manajemen sistem pendukung (<i>supporting system</i>) parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif.	
3.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 14-16 Juni 2024 ke Banten.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit <i>provider</i> belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
4.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Keprotokolan tanggal 18-20 Juni 2024 ke Jawa Barat.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Stasiun Kereta Cepat (KCIC) Bandung, Jawa Barat untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di stasiun kereta agar pelaksanaan keprotokolan bagi Anggota DPR RI berjalan lancar. 	
5.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Program Jamkestama, Tanggal 14-16 Juni 2024 ke Banten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit <i>provider</i> belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu R.I</i> • <i>Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN</i> • <i>PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)</i> 	Kunker dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024. Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Kendal, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga Lainnya.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anggota Kongres Committee On Oversight and Accoutability</i> • <i>Kepala Government Accountability Office (GAO)</i> 	Kunker dilaksanakan pada tanggal 19 Juni s.d. 21 Juni 2024. Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Bali, Provinsi Bali dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga Lainnya.	
